

**ANALISIS POTENSI DANA PENSIUN DALAM MENDUKUNG
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan guna Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



Oleh

Nama : Riska Rahmadiyah Munthe
NPM : 1505180018
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : RISKHA RAHMADIAH MUNTHE
NPM : 1505180018
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS POTENSI DANA PENSUN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si)

Penguji II

(MURVIANA KOTO, SE, M.Si)

Pembimbing

(HASTINA FEBRIATY, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA : RISKA RAHMADIAH MUNTHE
NPM : 1505180018
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS POTENSI DANA PENSIUN DALAM
MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, 15 Maret 2019

Pembimbing Skripsi

HASTINA FEBRIATY, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui
oleh :

Ketua Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI, RS, S.E., M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, M.M., M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Riska Rahmadiyah Munthe
NPM : 1505180018
Konsentrasi : —
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (~~Akuntansi/Perpajakan/Manajemen~~/Ekonomi
Pembangunan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut:
 - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merckayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dihukum di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghambutan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 4 - Juni 2019

Pembuat Pernyataan



Riska Rahmadiyah Munthe

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : RISKHA RAHMADIAH MUNTHE
N.P.M : 1505180018
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS POTENSI DANA PENSIUN
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
25 Feb 2019	Perbaiki kerangka konseptual Perbaiki format penulisan Perbaiki Hasil Penelitian Perbaiki uji Multikolinearitas tambahkan uji Asumsi Klasik uji Multikolinearitas		
4 Maret 2019	Perbaiki format penulisan Perbaiki Hasil Penelitian tambahkan pembahasan setiap Variabel Tambahkan uji Signifikansi Tambahkan perkembangan/indikator Ekonomi pembangunan		
11 Maret 2019	Tambahkan Deskripsi perkembangan Ekonomi Perbaiki uji Multikolinearitas		
13 Maret 2019	ACC Sidang		

Medan, 13 Maret 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Skripsi

HASTINA FEBRIATY, SE, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

ABSTRAK

Topik skripsi ini diangkat berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa masih tingginya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar daerah di Indonesia sehingga dampaknya terhadap pembangunan ekonomi belum signifikan. Infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama tercapainya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Saat ini infrastruktur Indonesia masih relative tertinggal dibandingkan negara-negara inti ASEAN lainnya. Dengan perkembangan dunia yang semakin pesat serta persaingan investasi yang dinamis antar negara-negara di dunia maka pemerintah merasa penting untuk semakin memperhatikan sektor infrastruktur dengan mengadakan berbagai program pembangunan. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh investasi, dana pensiun, dan produk domestic regional bruto terhadap infrastruktur di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, dimana data yang dihimpun adalah data *cross section* yaitu 10 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, sedangkan data *time series* yang digunakan dalam penelitian ini ialah dihimpun sebanyak 3 tahun, yaitu mulai 2015 hingga 2017. Berdasarkan hasil estimasi dengan metode regresi linier berganda menggunakan *software* E-Views 9, di ukur *goodness of fit* (R^2) pada model diperoleh nilai sebesar 98.31 %. Variabel independen yaitu INV, DP, dan PDRB secara simultan berpengaruh positif positif dan signifikan terhadap infrastruktur jalan nasional di 10 provinsi di Indonesia. Sedangkan secara parsial variabel INV berpengaruh positif dan signifikan terhadap INF. Variabel DP berpengaruh negative dan signifikan terhadap INF, dan variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap INF.

Kata Kunci : Infrastruktur, Investasi, Dana Pensiun, PDRB, dan Pembangunan Ekonomi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan proposal yang berjudul "**Analisis Potensi Dana Pensiun dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Indonesia**". Shalawat beriringan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. **ALLAH SWT**, yang telah memberikan Rahmat serta Rizkinya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat kesehata kepada penulis. Dan atas izin nya yang memberikan kesempatan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta ayahanda saya Bapak Nurman Munthe dan Ibunda saya Ibu Syamsinar Ritonga yang telah memberikan kasih sayang, yang telah membesarkan, mendidik, menberikan dukungan dan do'a nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Untuk adik-adik saya Mandala Putra, Riri Maharani dan Fathurrahman yang telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak H. Januri, SE.,MM.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ade Gunawan S.E, M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si sebagai wakil dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Prawidya Hariani R.S, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Dra. Roswita Hafni, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Ibu Hastina Febrianty, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang membantu saya berupa ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam pembuatan tugas akhir ini sehingga terselesaikan dengan baik dan lancar.
11. Seluruh Dosen mata kuliah jurusan Ekonomi Pembangunan atas ilmunya yang bermanfaat, semoga dapat menjadi amalan di akhirat kelak.
12. Bapak/ Ibu Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam akademik.

13. Sahabat terbaik Nurmauliza, Novia Lestari, Kemala Sari selama 2 tahun lebih, terima kasih untuk persahabatan dengan tangis dan tawa yang luar biasa bersama kalian sesuatu yang sangat berharga dan takkan terlupakan dalam hidup penulis. Terima kasih untuk ketulusan mengantar, menemani dan membantu penulis dalam mengambil data.
14. Untuk Teman-teman kos saya Devi Panjaitan, Siti masitoh, Yulana, Erni, dan Mia yang telah memberikan semangat dan dukungan moril yang sangat membantu proses penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman Program Studi Ekonomi Pembangunan angkatan 2015 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu, terima kasih yang terdalam untuk bantuan, dukungan dan doanya. Semoga keberkahan dan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin.
16. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu demi satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan bagi penulis dalam mencapai kesempurnaan proposal ini. Akhir kata penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan. Terima Kasih

Medan, Maret 2019
Penulis

(Riska Rahmadiyah Munthe)

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

- 1.1 Latar Belakang Masalah 1
- 1.2 Identifikasi Masalah..... 11
- 1.3 Batasan dan Rumusan Masalah 11
- 1.4 Tujuan Penelitian 12
- 1.5 Manfaat Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....14

- 2.1 Landasan Teori..... 14
 - 2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi 14
 - 2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi 22
 - 2.1.3 Teori Tabungan 28
 - 2.1.4 Teori Investasi 33
 - 2.1.5 Teori Konsumsi 38
 - 2.1.6 Teori Pendapatan Nasional..... 47
 - 2.1.7 Infrastruktur 50
- 2.2 Regulasi..... 51
 - 2.2.1 Dana Pensiun 51
- 2.3 Penelitian Terdahulu 57
- 2.4 Kerangka Konseptual..... 58
- 2.5 Hipotesa 59

BAB III METODE PENELITIAN..... 60

- 3.1 Pendekatan Penelitian 60
- 3.2 Definisi Operasional 60
- 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian..... 61
- 3.4 Jenis dan Sumber Data..... 61
- 3.5 Teknik pengumpulan Data..... 62
- 3.6 Model Estimasi 62

3.7	Metode Analisis Data.....	63
3.7.1	Metode Data Panel	63
3.7.2	Estimasi Model Data Panel	64
3.7.3	Uji Spesifikasi Model.....	65
3.8	Tahapan Analisis.....	66
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	75
4.1	Analisis Deskripsi Perkembangan Dana Pensiun	75
4.2	Analisis Deskripsi Indikator Pembangunan Ekonomi Indonesia	79
4.3	Deskripsi Data.....	87
4.4	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	92
4.4.1	Statistik Deskriptif.....	92
4.4.2	Hasil Analisis Regresi	94
4.4.3	Penaksiran	96
4.4.4	Uji Statistik.....	97
4.4.5	Uji Asumsi Klasik	98
4.4.6	Interpretasi Hasil	101
4.4.7	Konstanta dan Intersep	102
4.5	Pembahasan Hasil Regresi Linier Berganda.....	105
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	110
5.1	Kesimpulan	110
5.2	Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Belanja Rutin dan Belanja Modal di APBN.....4
Tabel 1.2	Perkembangan Total Investasi dan <i>Gross Nasional Saving</i> terhadap GDP 1.....7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu57
Tabel 3.1	Definisi Operasional.....61
Tabel 4.1	Realisasi Investasi PMDN Indonesia.....90
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif.....93
Tabel 4.3	Regresi Berganda Model INF.....94
Tabel 4.4	Logaritma Natural Model INF.....95
Tabel 4.5	<i>Autoregressive Model of</i> INF.....96
Tabel 4.6	Uji Multikolinearitas dengan Uji VIF.....98
Tabel 4.7	Uji Heterokedastisitas dengan Uji White.....99
Tabel 4.8	Uji Hausman.....100

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Piramida Penduduk Indonesia 2017 Berdasarkan Jenis Kelamin..10
Gambar 2.1	Fungsi Konsumsi Daur-Hidup.....45
Gambar 2.2	Grafik Perubahan Kekayaan Menggeser Fungsi Konsumsi.....46
Gambar 2.3	Fungsi Konsumsi, Pendapatan, dan Kekayaan Selama Daur-Hidup.....47
Gambar 2.4	Kerangka Penelitian.....58
Gambar 2.5	Kerangka Konseptual Model.....59
Gambar 4.1	Perkembangan Aset Bersih Dana Pensiun.....76
Gambar 4.2	Pertumbuhan Investasi Dana Pensiun 2013-2017.....77
Gambar 4.3	Perkembangan Portofolio Investasi Dana Pensiun Tahun 2013-2017.....78
Gambar 4.4	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....80
Gambar 4.5	PDB Per kapita Indonesia Tahun 2010-2018.....82
Gambar 4.6	Persentase Penduduk Miskin Indonesia.....84
Gambar 4.7	Indeks Pembangunan Manusia.....86
Gambar 4.8	Anggaran Infrastruktur Indonesia.....89
Gambar 4.9	Pertumbuhan PDB Indonesia menurut Lapangan Usaha ADHK 2010.....92
Gambar 4.10	Perbandingan PDB,DP,INV (Triliun rupiah).....108

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan produktifitas dari pemanfaatan sumberdaya potensial yang dimiliki oleh suatu wilayah atau suatu negara. Sumberdaya potensial dimaksud adalah sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya financial. Peningkatan produktifitas mengandung makna bahwa pemanfaatan sumberdaya tersebut secara ekonomis dapat diproduksi dengan hasil yang optimal dari kapasitas sumberdaya yang digunakan. Upaya seperti ini merupakan sebuah proses pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk melakukan perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Para pendiri bangsa Indonesia telah menetapkan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kearah yang lebih baik dan merata. Untuk mencapainya maka peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan sangat strategis. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pembangunan termasuk untuk merumuskan arah pembangunan di masa yang akan datang. Berdasarkan hal diatas, pembangunan dalam makro ekonomi adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pengangguran yang sedikit. Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tersebut memerlukan berbagai faktor pendukung yaitu salah satunya yang penting adalah keberadaan infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur yang baik diharapkan dapat merangsang dunia usaha untuk menanamkan modalnya dalam investasi langsung sehingga

mempertinggi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik juga akan memberikan akses yang lebih luas untuk menikmati sumber daya (Cahyono, 2010:1).

Peran infrastruktur sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional dan daerah dibutuhkan untuk menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi. Secara ekonomi makro, ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Sehingga perannya sangat penting baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi dan ekspor (Permana, 2009:1).

Bank Dunia (dalam Wahyuni, 2009:20-21) mendefinisikan infrastruktur ekonomi, merupakan aset fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi final, meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), *publik work* (jalan, bendungan, kanal, saluran irigasi dan drainase), serta sektor transportasi (jalan, rel kereta api, angkutan pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya). Keterkaitan antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari fungsi infrastruktur sebagai *enabler* kegiatan ekonomi. Infrastruktur mempunyai manfaat menggerakkan berbagai sektor perekonomian karena dianggap sebagai *social overhead capital* (Permana, 2009:11).

Infrastruktur yang buruk dapat mengakibatkan turunnya tingkat pelayanan sehingga dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja dan pada akhirnya akan banyak perusahaan keluar dari bisnis atau

membatalkan ekspansinya. Karena itulah infrastruktur sangat berperan dalam proses produksi dan merupakan prakondisi yang sangat diperlukan untuk menarik akumulasi modal sektor swasta. Keberadaan infrastruktur juga akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi, dan sebaliknya apabila mengabaikannya maka akan menurunkan produktivitasnya. Infrastruktur bisa menjadi jawaban bagi negara-negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonominya dan membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta merendahkan biaya aktivitas investor dalam dan luar negeri.

Penyediaan infrastruktur jalan masih menjadi tantangan utama pembangunan ekonomi di Indonesia. Secara umum, infrastruktur jalan di daerah-daerah di Indonesia baik itu provinsi maupun kab/kota relative terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Padahal ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah yang ada di Indonesia untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonominya, mempercepat penurunan kemiskinan, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam, meningkatkan daya saing ekonomi antar wilayah, dan memperbaiki akses penduduk terhadap sumberdaya, pasar, dan layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.

Kaitan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi dalam pengertian infrastruktur adalah spek fisik dan financial yang terkandung dalam jalan raya, jalur kereta api, pelabuhan dan bentuk-bentuk sarana transportasi lainnya. Tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan

menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi (Todaro, 2000).

Kajian teori pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan dukungan penyediaan infrastruktur. Sebagai negara berkembang, dimana peran pemerintah dalam perekonomian relatif besar, pengeluaran pemerintah praktis dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi Indonesia pada umumnya, bukan saja karena pengeluaran ini dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat yang kenaikannya akan mendorong produkt domestik.

Di negara – negara berkembang seharusnya pengeluaran terbesar dialokasikan untuk pembangunan infratraktur yang merupakan barang publik dan juga untuk membiayai kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Selain itu, hal ini pun berkaitan dengan meningkatnya defisit fiscal dinegara-negara berkembang, karena keterbatasan kemampuan negara dalam meningkatkan penerimaannya untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin tinggi.

Tabel 1.1
Belanja Rutin Pemerintah dan Belanja Modal di APBN

Tahun	Belanja Pemerintah (triliun rupiah)	Belanja Modal (triliun rupiah)	Belanja Rutin Gaji Pegawai (triliun rupiah)
2004	374.4	20.4	56.7
2005	361.2	32.9	54.3
2006	440.0	54.9	73.3

2007	504.6	64.3	90.4
2008	693.4	72.8	112.8
2009	628.8	75.9	127.6
2010	697.4	80.3	148.1
2011	883.7	117.9	175.7
2012	1,069.5	176.1	212.3
2013	1,154.4	184.4	241.6
2014	1,876.0	160.8	258.4
2015	1,984.0	252.8	299.3
2016	2,095.7	206.6	342.4
2017	2,080.5	194.3	343.3

Sumber : Kementerian Keuangan dan diolah (www.kemenkeu.go.id)

Dari data pengeluaran pemerintah di atas dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, akan tetapi jika dilihat proporsi belanja rutin dan belanja modal pemerintah terlihat bahwa belanja yang dikeluarkan untuk belanja rutin khususnya belanja rutin gaji pegawai seperti tabel diatas masih lebih besar daripada belanja modal yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi maupun sosial. Sehingga dibutuhkan investasi dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mengurangi gap belanja rutin dan belanja pembangunan tersebut.

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya investasi maka akan tercipta perubahan barang modal baru dan akan menyerap faktor produksi baru seperti menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja baru yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dengan adanya investasi – investasi baru maka akan terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut, sehingga akan merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung upaya pembangunan ekonomi, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah, pihak swasta maupun terhadap masyarakat. Namun kekurangan modal untuk

melakukan investasi merupakan salah satu persoalan utama dalam pembangunan ekonomi dinegara berkembang. Kekurangan modal ini terjadi karena rendahnya pendapatan masyarakat yang berdampak pada rendahnya kemampuan menabung sehingga mengakibatkan dana untuk melakukan investasi sangat terbatas. Pada dasarnya dalam proses pelaksanaan pembangunan ekonomi negara-negara dunia ketiga, akumulasi hutang luar negeri (*external debt*) merupakan suatu gejala umum yang wajar, karena tabungan domestic yang rendah tidak memungkinkan dilakukan investasi secara memadai sehingga pemerintah negara-negara berkembang harus menarik dana pinjaman dan investasi dari luar negeri (Michael P.Todaro, 2003).

Di Indonesia tabungan sebagai sumber dana investasi masih belum dapat mencukupi karena masih relative rendah. Menurut Nurkse R (1953), di negara berkembang terdapat lingkaran perangkap kemiskinan yang tidak berujung pangkal. Dari lingkaran perangkap kemiskinan tersebut diketahui bahwa rendahnya pendapatan masyarakat sebagai akibat dari rendahnya produktivitas. Pendapatan dan produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan untuk menabung rendah. Kemampuan menabung yang rendah mengakibatkan pembentukan modal dan produktivitas rendah sehingga pertumbuhan juga rendah. Perlunya tabungan nasional ini dibuktikan dengan adanya saving-investment gap yang semakin melebar dari tahun ke tahun yang menandakan bahwa pertumbuhan investasi domestic melebihi kemampuan dalam mengakumulasi tabungan nasional. Pengerahan modal yang bersumber dari dalam negeri berasal dari 3 sumber utama (Sadono Sukirno, 2006), yaitu :

pertama, tabungan sukarela masyarakat. Kedua, tabungan pemerintah. Dan ketiga, tabungan paksa.

Tabel 1.2
Perkembangan Total Investasi dan *Gross National Savings* terhadap GDP

Tahun	Total Investasi /GDP (%)	<i>Gross National Savings</i>/GDP (%)
2010	32.89	33.58
2011	32.98	33.17
2012	35.07	32.42
2013	33.83	31.51
2014	34.60	32.03
2015	34.06	32.03
2016	33.85	32.03
2017	33.45	31.74

Sumber : IMF data diolah (www.imf.org)

Dari data di atas dapat dilihat adanya gap antara investasi dan tabungan nasional. Pada tahun 2012-2017 terlihat bahwa posisi $S < I$ yang artinya tabungan kita belum mampu untuk menutupi kebutuhan investasi kita. Sehingga diperlukan investasi dari luar negeri untuk menutupi kesenjangan tabungan dan investasi itu. Akan tetapi jika kita terus berharap investasi dari luar negeri untuk menutupi gap kesenjangan tersebut maka akan beresiko terhadap perekonomian Indonesia jika terjadi gejolak pada ekonomi global. Oleh sebab itu saat ini pemerintah telah mulai melirik dana-dana didalam negeri yang bisa digunakan dalam jangka panjang terutama untuk pembangunan infrastruktur seperti dana pensiun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Bodjonegoro mengatakan Indonesia akan menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai

prioritas utama pada 2018. Dia mengatakan, China merupakan contoh yang berhasil menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi dua digit melalui pembangunan infrastruktur yang masif. Masalahnya, Indonesia memiliki keterbatasan dana untuk menggenjot pembangunan infrastruktur karena pendapatan negara dari pajak terbatas, begitu juga dengan utang luar negeri. Oleh sebab itu dana pensiun bisa menjadi alternative utama karena investasi di pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana jangka panjang sangat cocok dengan investasi dana pensiun yang juga berj angka panjang. Direktur utama dana pensiun karyawan BPJS Ketenagakerjaan, Abdul Latief Algaff juga mengatakan investasi diproyek infrastruktur memang lebih cocok bagi penyelenggara dana pensiun karena sesuai dengan pola investasinya yang berjangka panjang. Karena itu, dia mendukung kebijakan OJK yang mewajibkan pengelola dana pensiun untuk berinvestasi 30 persen di Surat Berharga Negara (Okezone.com, 2018).

Di Indonesia, dana pensiun untuk pegawai pemerintah pada jaman penjajahan di atur dalam *Staatsblad* nomor 550 tahun 1992 dan nomor 557 tahun 1934. Pemerintah RI setelah zaman kemerdekaan menerbitkan PP No 60 tahun 1951 tentang peraturan sementara mengenai pemberian pensiun kepada pegawai negeri dan janda beserta anak piatunya. Kemudian lahirlah UU No 20 tahun 1952 dan UU No 11 tahun 1956 tentang dana pensiun serta peraturan-peraturan pemerintah yang merevisi aturan-aturan pemerintah Belanda. Pada tanggal 6 April 1963 setelah menerima usulan dari hasil rapat-rapat, Presiden Soekarno menerbitkan PP No 9 tahun 1963 tentang pembelanjaan kesejahteraan pegawai negeri. Pada tanggal 17 April 1963, berdasarkan PP No 15 tahun 1963 tentang

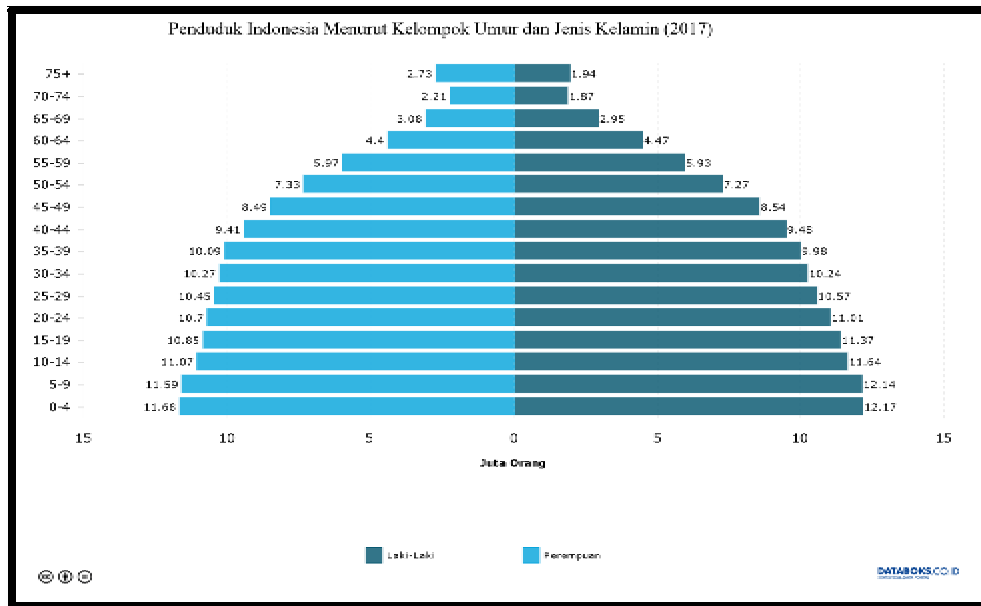
pendirian perusahaan negara tabungan dan asuransi pegawai negeri, dibentuk badan pengelola dana tabungan dan asuransi pegawai negeri yaitu Perusahaan Negara Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN Taspen).

Berdasarkan UU No 9 tahun 1969 tentang bentuk perusahaan negara, PN Taspen berubah menjadi Perum Taspen yang kemudian diubah menjadi PT Taspen berdasarkan PP No 26 tahun 1981. Pada jaman penjajahan Belanda sudah dikenal yaysan untuk pegawai swasta termasuk yayasan yang bertujuan untuk mengelola dana pensiun. Sebagai contoh, tahun 1969 terdapat Yayasan Dana Pensiun Pertamina yang pengelolaan dananya masih dicampur dengan institusi pendirinya dan kemudian yayasan tersebut sempat dibekukan dan dikembalikan kepada pendirinya. Sebagian pegawai BUMN semula adalah pegawai negeri dan peserta PT Taspen. Kemudian, BUMN banyak merekrut pegawai sendiri yang tidak menjadi pegawai negeri dan bukan peserta PT Taspen. Terdapat perbedaan sistem penggajian antara pegawai dengan pegawai BUMN, sehingga muncul pemikiran adanya pengelolaan pensiun selain Perum Taspen dan Yayasan mulai dipertimbangkan. Tahun 1992 lahir Undang-undang no 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang mengatur dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang bersifat sukarela (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi OJK, 2016: 6-8).

Potensi dana pensiun memang cukup besar, hal ini dapat kita lihat dari proporsi penduduk kita saat ini yang mana penduduk usia produktif atau usia muda masih lebih banyak dibandingkan yang sudah berusia tua.

Gambar 1.1

Piramida Penduduk Indonesia 2017 berdasarkan Jenis Kelamin



Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa proporsi penduduk usia muda sangatlah besar, artinya dengan proporsi usia muda yang besar tersebut maka potensi untuk meningkatnya dana pensiun juga sangatlah besar. Dengan peningkatan dana pensiun tersebut maka sumber dana untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur juga akan bertambah, sehingga dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar daerah yang hasilnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dari latar belakang di atas, banyak permasalahan yang timbul dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang adil. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan melihat bagaimana hubungan yang ditimbulkan antara penggunaan dana pensiun dengan pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk itu penelitian ini berjudul “Analisis

Potensi Dana Pensiun dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Indonesia”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka didapat beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Besarnya gap antara investasi dan tabungan sehingga pembangunan infrastruktur menjadi kurang optimal.
2. Utang luar negeri yang meningkat karena untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
3. Ruang fiscal APBN yang dialokasikan untuk belanja pembangunan dan infrastruktur masih rendah sehingga tidak optimal dalam mengentaskan masalah pembangunan serta ketimpangan infrastruktur antar daerah.
4. Adanya dana dalam negeri seperti dana pensiun yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Ada banyak masalah dalam penelitian ini, namun penulis perlu membatasi masalah yang lebih terperinci dan jelas agar pemecahannya terarah. Jadi penelitian ini hanya dibatasi pada masalah *seberapa besar Dana Pensiun, Belanja Modal dan Investasi dapat Mendukung Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam hal Infrastruktur.*

1.3.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan dana pensiun dan Pembangunan Ekonomi Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh investasi, dana pensiun dan PDRB terhadap infrastruktur di Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Melakukan analisa deskriptif tentang perkembangan dana pensiun dan indikator pembangunan ekonomi Indonesia.
2. Melakukan estimasi pengaruh yang ditimbulkan dari dana pensiun, belanja modal dan investasi terhadap infrastruktur di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia di sektor keuangan negara dan pembangunan ekonomi maupun kalangan masyarakat umum.

Manfaat yang dapat diambil diantaranya :

1.5.1 Manfaat Akademik

a Bagi Peneliti :

- 1) Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topic yang sama.

2) Bagi mahasiswa :

- 1) Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis dan sistematis.
- 2) Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.

1.5.2 Manfaat Non-akademik

- a Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintah.
- b Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

a. Teori Pembangunan Ekonomi Adam Smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal, adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diterbitkan 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan dibawah ini (Jhingan, 2010:81-83) :

- 1) Hukum alam, Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingan sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya itu demi keuntungannya sendiri. Setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraan mereka secara agregat. Smith pada dasarnya menentang setiap campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan.
- 2) Pembagian kerja, pembagian kerja adalah titik permulaan teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan produksi dengan : (1) meningkatnya keterampilan pekerja; (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang;

(3) penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga; dan (4) kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Teknologi majulah yang melahirkan pembagian kerja dan perluasan kerja.

- 3) Proses pemupukan modal. Smith menekankan, pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi, dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. “Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus-menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan”. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.
- 4) Agen pertumbuhan. Menurut Smith, para petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Pertanian Bagi Smith pembangunan, dan perniagaan. Pada waktu terjadi kenaikan surplus pertanian sebagai akibat pembangunan ekonomi, maka permintaan akan jasa perniagaan dan barang pabrikan akan meningkat pula, ini semua akan membawa pada kemajuan perniagaan dan berdirinya industri manufaktur. Jadi pemupukan modal dan pembangunan ekonomi terjadi karena tampilnya para petani, produsen, dan pengusaha.
- 5) Proses pertumbuhan. Schumpeter menjelaskan pendekatan pertumbuhan ekonomi Adam Smith sebagai berikut “Dengan menganggap benar faktor-

faktor kelembagaan, politik dan alam, Smith berangkat dari asumsi bahwa suatu kelompok sosial (suatu bangsa) akan mengalami laju pertumbuhan ekonomi tertentu yang tercipta karena naiknya jumlah mereka dan melalui tabungan ini mendorong “meluasnya pasar” yang pada gilirannya meningkatkan pembagian kerja dan dengan demikian meningkatkan produktivitas”. Menurut Smith pertumbuhan ini bersifat kumulatif. Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan menarik ke pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya penduduk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan keuntungan secara terus-menerus.

b. Teori Pembangunan Ekonomi David Ricardo

Teori-teori Ricardo didasarkan pada asumsi

1. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri.
2. “Law of diminishing return” berlaku bagi tanah.
3. Persediaan tanah adalah tetap.
4. Permintaan akan gandum benar-benar inelastik.
5. Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel.
6. Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu (given).
7. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal.
8. Harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap.

9. Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal, dan bahwa harga permintaan maupun penawaran buruh tidak tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja.
10. Terdapat persaingan yang sempurna.
11. Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan

Berdasarkan asumsi tersebut, Ricardo membangun teorinya tentang saling hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Menurut Ricardo, pemupukan modal merupakan keuntungan, sebab keuntungan merupakan kekayaan yang disisihkan untuk pembentukan modal. Pemupukan modal tergantung pada 2 faktor : pertama, kemampuan untuk menabung dan kedua, kemauan untuk menabung. Kemampuan menabung lebih penting dalam pemupukan modal. Ini tergantung pada penghasilan bersih masyarakat, yaitu sisa lebih dari keseluruhan output setelah dikurangi biaya hidup minimal buruh (subsistens). Makin besar surplus tersebut, makin tinggi kemampuan untuk menabung (Jhingan, 2010:89)

Menurut Ricardo, sumber lain pemupukan modal dalam pembangunan ekonomi tergantung pada perbedaan antara produksi dan konsumsi. Karena itu ia menekankan pentingnya peningkatan produksi dan pengurangan konsumsi (Jhingan, 2010:90) Sumber-sumber pemupukan modal lainnya ialah :

- 1) Pajak, pajak adalah sumber pemupukan modal yang ada ditangan pemerintah. Menurut Ricardo, pajak dikenakan hanya untuk mengurangi konsumsi yang berlebihan. Dalam hal ini pengenaan pajak pada para kapitalis, pemilik tanah, dan buruh, akan memindahkan sumbe-sumber dari kelompok ini kepada pemerintah. Tetapi pajak sebaliknya mempengaruhi

investasi. Oleh sebab itu Ricardo tidak menyetujui pengenaan pajak, karena pajak akan mengurangi pendapatan, laba, dan pemupukan modal. Dalam istilah Ricardo, “ tidak ada pajak yang mempunyai kecenderungan untuk mengurangi kekuatan pemupukan modal.”

- 2) Tabungan, dibanding pajak Ricardo lebih menyetujui pemupukan modal melalui tabungan. Tabungan dapat dibentuk dengan cara menghemat pengeluaran, memproduksi lebih banyak, dan dengan meningkatkan keuntungan serta mengurangi harga barang. Semakin banyak tabungan semakin banyak pemupukan modal.
- 3) Perdagangan bebas, Ricardo membela adanya perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan faktor penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Tingkat keuntungan dapat terus-menerus tinggi. Dengan cara ini sumberdaya dunia dapat digunakan secara lebih efisien melalui perdagangan luar negeri.

c. Teori Pembangunan Ekonomi Malthus

Konsep pembangunan Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malahan proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten di pihak rakyat.

Malthus menitikkan perhatian pada “perkembangan kesejahteraan” suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut. Malthus menganggap peranan produksi dan distribusi sebagai dua unsur utama dalam kesejahteraan. Jika keduanya

dikombinasikan pada proporsi yang benar, ia akan dapat meningkatkan kesejahteraan suatu negara dalam waktu singkat. Tetapi jika keduanya dijalankan secara terpisah atau dikombinasikan pada proporsi yang tidak benar, maka akan diperlukan beberapa ribu tahun untuk meningkatkan kesejahteraan (Jhingan, 2010:98).

Malthus mendefinisikan problem pembangunan ekonomi sebagai sesuatu yang menjelaskan perbedaan antara Gross National Product potensial (kemampuan menghasilkan kekayaan) dan Gross National Product actual (kekayaan actual). Menurut Malthus besarnya GNP potensial tergantung pada tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi (Jhingan, 2010:98). Bila keempat faktor ini dipakai dalam proporsi yang benar, maka ia akan memaksimalkan produksi di dua sektor utama perekonomian yaitu sektor pertanian dan sektor industri.

Dari semua faktor diatas, akumulasi modal merupakan faktor paling penting bagi pembangunan ekonomi. Malthus mengatakan, “peningkatan kesejahteraan yang mantap dan berkesinambungan tidak mungkin tercapai tanpa penambahan modal secara terus menerus. “Sumber akumulasi modal adalah laba. Laba berasal dari tabungan para pemilik modal. Para pekerja terlalu miskin untuk menabung. Jika para pemilik modal lebih banyak menabung dan tidak banyak membeli barang konsumsi lantaran ingin memperoleh sisa laba lebih besar, pertumbuhan ekonomi akan menjadi lamban”. Seperti dikatakan Malthus “kekayaan suatu negara pada umumnya diciptakan oleh tabungan yang disisihkan dari keuntungan yang meningkat, dan sama sekali bukan karena pengurangan pengeluaran pada barang-barang mewah dan barang-barang kesenangan”.

Sebenarnya Malthus mengemukakan suatu konsep tentang “kecenderungan tertinggi untuk menabung”. Bagi Malthus konsep ini berarti menabung dari persediaan yang sebenarnya dipersiapkan untuk konsumsi yang bersifat mendesak dan menambahkannya pada persediaan yang dimaksudkan untuk memperoleh laba, atau dengan kata lain, pengkonversian pendapatan menjadi modal. Jadi kesimpulannya, “tabungan yang didorong secara berlebihan akan merusak motif kearah produksi”. Malthus mengajukan beberapa saran untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.

1. Pertumbuhan berimbang. Didalam sistem Malthus, perekonomian dibagi menjadi sektor pertanian dan sektor industri. Kemajuan teknologi pada kedua sektor itulah yang dapat membawa kepada pembangunan ekonomi.
2. Menaikkan permintaan efektif. Akan tetapi kemajuan teknologi saja tidak dapat mendorong pembangunan ekonomi, kecuali kalau permintaan efektif meningkat. Malthus menyarankan sejumlah langkah untuk menaikkan permintaan efektif. Pertama, dengan pendistribusian kesejahteraan dan pemilikan tanah secara lebih adil. Kedua, permintaan efektif dapat ditingkatkan dengan memperluas perdagangan internal dan eksternal. Perdagangan internal sebagaimana juga perdagangan eksternal akan meningkatkan keinginan, selera, dan hasrat untuk mengkonsumsi “yang secara mutlak perlu untuk menjaga harga pasar komoditi dan mencegah berkurangnya laba.” Ketiga, Malthus menyarankan agar mempertahankan konsumen tidak produktif untuk meningkatkan permintaan efektif. Dia mendefinisikan konsumen tidak produktif sebagai orang-orang yang tidak memproduksi barang material. Konsumsi rendah inilah yang menyebabkan

persediaan barang melimpah dan stagnasi di suatu negara. Karena itu, produksi dapat ditingkatkan dengan menaikkan konsumsi. Karena para pemilik modal terlalu hemat dan pekerja produktif hidup dengan upah hanya sekedar penyambung hidup, konsumen tidak produktif di kalangan pekerja tidak produktif dan tuan tanah akan meningkatkan permintaan efektif.

d. Teori Pembangunan Ekonomi Mill

Mill menganggap pembangunan ekonomi sebagai fungsi dari tanah, tenaga kerja, dan modal. Sementara tanah dan tenaga kerja adalah dua faktor produksi yang asli, modal adalah “persediaan yang dikumpulkan dari produk-produk tenaga kerja sebelumnya.”

Peningkatan kesejahteraan hanya mungkin bila tanah dan modal mampu meningkatkan produksi lebih cepat dibanding angkatan kerja. Kesejahteraan terdiri dari peralatan, mesin, dan keterampilan angkatan kerja. Tenaga kerja produktif inilah yang merupakan pencipta kesejahteraan dan akumulasi modal. Menurut Mill, laju akumulasi modal tergantung pada, (1) jumlah dana yang dapat menghasilkan tabungan atau besarnya sisa hasil usaha, dan (2) kuatnya kecenderungan untuk menabung (Jhingan, 2010:106). Modal adalah hasil dari tabungan dan tabungan berasal dari penghematan konsumsi saat ini demi kepentingan konsumsi dimasa datang. Walaupun modal adalah hasil dari tabungan, namun modal tersebut dipergunakan. Ini berarti tabungan adalah pengeluaran. Hal tersebut menggambarkan kepercayaan Mill pada hukum pasarnya Say.

Karena tabungan tergantung pada besarnya sisa hasil usaha, maka tabungan tersebut naik bersama naiknya laba dan sewa yang dipakai untuk

membuat sisa hasil itu. Pada sisi lain, kuatnya kecenderungan menabung tergantung pada (1) tingkat laba, dan (2) keinginan untuk menabung atau apa yang disebut Mill sebagai “keinginan efektif untuk mengakumulasi modal.”

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Sedangkan Kuznet (Jhingan, 2010:57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai kemampuan negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus mengikat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya.

Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang (Sukirno, 2004:435). Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas, bahwa pertumbuhan ekonomi merujuk pada suatu proses untuk memperoleh output, dimana ukuran pencapaian memerlukan jangka panjang

b. Teori Pertumbuhan Solow-Swan

Teori ini memandang bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap

sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Sumber pertumbuhan dapat dibedakan menjadi pertumbuhan yang disebabkan oleh modal, tenaga kerja, dan perubahan dalam produktivitas. Perbedaan dalam produktivitas ini menjelaskan adanya perbedaan pertumbuhan antar negara, sedangkan yang mempengaruhi produktivitas adalah kemajuan teknologi. Dengan mengasumsikan suatu tingkat tabungan dan tingkat pertumbuhan penduduk tertentu, model pertumbuhan Solow-Swan dapat menghasilkan berapa tingkat pendapatan per kapita suatu negara. Bentuk produksi dalam model pertumbuhan Solow adalah :

$$Q = f(K, L); K, L > 0 \dots\dots\dots(2-1)$$

Pada persamaan di atas Q adalah output bersih sesudah depresiasi, K adalah modal, dan L adalah tenaga kerja,. Menurut Romer dan Well (Nazara, 1994:22) model di atas diperbaiki dengan memecah *total factor productivity* dengan memasukkan variabel lain yang dapat menjelaskan pertumbuhan. Model pertumbuhan ini selanjutnya disebut dengan model pertumbuhan endogen (*endogenous growth model*). Dalam model pertumbuhan endogen ini dicari variabel yang dapat dimasukkan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Salah satu variabel yang dianggap dapat ikut menjelaskan pertumbuhan dari suatu ekonomi adalah variabel sumber daya manusia.

Pada tahap selanjutnya, Solow berusaha memasukkan variabel perubahan teknologi dalam model pertumbuhan. Variabel perubahan teknologi ini menggambarkan kondisi pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi, dimana saat teknologi berkembang maka tingkat efisiensi tenaga kerja juga akan naik. Dengan adanya kemajuan teknologi, model Solow akhirnya bisa

menjelaskan kenaikan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan yang dialami oleh berbagai negara. Model Solow menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa mengarah ke pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per pekerja. Tingkat tabungan yang tinggi mengarah ke tingkat pertumbuhan yang tinggi hanya jika kondisi *steady-state* dicapai. Dengan penambahan variabel baru maka persamaan awal dari Solow berubah menjadi :

$$Y = f(K, L \times E) \dots \dots \dots (2-2)$$

Pada persamaan di atas E adalah variabel baru dari teknologi yang selanjutnya disebut efisiensi tenaga kerja, sedangkan $L \times E$ menunjukkan jumlah tenaga kerja yang efektif. Fungsi produksi yang baru ini menyatakan bahwa jumlah output (Y) adalah tergantung pada jumlah unit modal (K) dan jumlah pekerja yang efektif ($L \times E$).

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya, demikian sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Permintaan konsumsi tergantung pada kecenderungan untuk mengkonsumsi. Yang disebut terakhir ini tidak meningkat secepat kenaikan pendapatan. Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat dijabatani oleh investasi. Jika volume investasi yang diperlukan

tak terpenuhi maka harga permintaan agregat akan turun, lebih rendah daripada harga penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai jurang tersebut terjembatani.

Jadi perbedaan antara pekerjaan dan pendapatan ini sebagian besar akan tergantung pada investasi. Volume investasi tergantung pada efisiensi marginal dari modal dan suku bunga. Efisiensi marginal dari modal merupakan tingkat hasil yang diharapkan dari aktiva modal baru. Bilamana harapan laba tinggi, pengusaha menginvestasi lebih besar. Suku bunga, yang merupakan faktor lainnya dari investasi, tergantung pada kuantitas. Sekarang investasi dapat dinaikkan melalui peningkatan efisiensi marginal dari modal atau penurunan suku bunga. Walaupun kenaikan investasi biasanya menyebabkan kenaikan pekerjaan, ini bisa tidak terjadi jika pada waktu yang sama kecenderungan untuk mengkonsumsi turun.

Sebaliknya, naiknya kecenderungan berkonsumsi dapat mengakibatkan kenaikan pada pekerjaan tanpa kenaikan pada investasi. Kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan, karena pendapatan meningkat, muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan berikutnya pada pendapatan dan pekerjaan. Proses ini cenderung menggumpal (kumulatif). Akibatnya kenaikan tertentu pada investasi menyebabkan kenaikan yang berlipat pada pendapatan melalui kecenderungan berkonsumsi. Hubungan antara kenaikan investasi dan pendapatan ini oleh Keynes disebut multiplier K. pengali (multiplier) ini memperlihatkan hubungan yang tepat, berkat adanya kecenderungan berkonsumsi tersebut, antara pekerjaan agregat dan pendapatan agregat dengan tingkat investasi. Ini berarti bila investasi

agregat naik, pendapatan akan meningkat, yang besarnya adalah K kali kenaikan investasi tersebut. Rumusnya ialah :

$$\Delta Y = K \cdot \Delta I \dots \dots \dots (2-3)$$

Dan $1-1/K$ mewakili kecenderungan marginal mengkonsumsi. Jadi rumus pengali K yaitu :

$$K = 1/1-MPC \dots \dots \dots (2-4)$$

Karena kecenderungan marginal mengkonsumsi turun berkat adanya kenaikan pendapatan, maka diperlukan suntikan investasi dengan dosis besar guna memperoleh tingkat pendapatan dan pekerjaan yang lebih tinggi dalam perekonomian. Inilah secara singkat teori Keynes mengenai pekerjaan.

d. Teori Pertumbuhan Ekonomi *Overlapping Generation* oleh Ramsey (1992) – Diamond (1965)

Model ini berupaya menganalisis sejauh mana tingkat kesejahteraan konsumen dicapai jika rumah tangga meningkatkan konsumsinya baik pada periode sekarang maupun pada periode yang akan datang. Keputusan konsumen untuk meningkatkan konsumsinya pada periode 1 atau periode akan datang tergantung pada *discount rate* dan intervensi pemerintah. Nampaknya bahwa dalam Ramsey terdapat dinamika dalam hal konsumsi dan modal untuk memusat ke garis pertumbuhan yang seimbang.

Kelebihan dari model Ramsey adalah menganalisis pengaruh dari kebijakan fiskal pemerintah. Beberapa asumsi penting dalam model Ramsey adalah bahwa (1) pembelian pemerintah tidak mempengaruhi konsumsi masyarakat dan tidak mempengaruhi output di masa akan datang. (2) pembelian pemerintah lebih diarahkan ke konsumsi publik daripada investasi publik. (3) pembiayaan berasal

dari pajak *lump-sum*. Suatu peningkatan pengeluaran pemerintah ($G(t)$), akan mengurangi persediaan modal swasta dan output. Hal ini berarti terjadi *crowding out effect*.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari model Ramsey ; (1) besar kecilnya tabungan sangat ditentukan oleh perilaku rumah tangga sepanjang hidupnya, (2) pengaruh kebijakan fiskal khususnya pembelian pemerintah justru mengurangi tabungan nasional dan persediaan modal yang pada akhirnya pertumbuhan output menurun.

Dalam model Diamond perilaku pemerintah juga mengurangi persediaan modal di masa akan datang. Asumsi yang digunakan adalah terdapat *turnover* penduduk dan masa hidup rumah tangga terbatas, katakanlah hanya dua periode. Dengan kata lain bahwa rumah tangga tidak lagi tetap, tetapi ada rumah tangga baru atau generasi baru yang akan mempengaruhi pola konsumsi baik pada periode sekarang maupun pada periode yang akan datang. Ketika individu masih muda dia menawarkan tenaga kerjanya dan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang mereka peroleh diperhadapkan oleh dua pilihan antara konsumsi dan tabungan pada periode pertama dan pada periode kedua biasanya individu mengkonsumsi tabungannya dan tingkat bunga dari tabungan. Ketika pada periode pertama tabungan ditingkatkan maka ada peluang pada periode pertama pada periode pertama untuk mengakumulasi modal yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan output. Akan tetapi jika pilihan individu mengurangi tabungan pada periode pertama dalam arti konsumsi meningkat maka tambahan persediaan modal dan output menurun.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian model Ramsey dan Diamond yaitu bahwa tabungan sesungguhnya tidak eksogen tetapi ia endogen, sehingga ada kaitannya dengan perilaku rumah tangga apakah lebih memilih untuk mengkonsumsi pada periode pertama ataukah memilih untuk mengkonsumsi pada periode kedua. Keputusannya akan mempengaruhi akumulasi modal yang berguna untuk mendorong pertumbuhan output per pekerja. Tetapi tingkat pengembalian dari akumulasi modal mengalami penurunan ketika perekonomian sudah berada pada tingkat kapasitas penuh. Selain itu model Ramsey-Diamond masih menggunakan asumsi kemajuan teknologi eksogen dan *diminishing return of capital* (Ibnu, 2013:22).

2.1.3 Teori Tabungan

Dalam teori Harrod-Domar, tabungan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bila suatu negara ingin tumbuh dengan cepat, maka jumlah tabungan harus ditingkatkan dan nilai dari ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) harus diperkecil. Tabungan yang merupakan sumber dana bagi pembangunan dapat berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Namun pada umumnya di negara sedang berkembang tingkat tabungan dalam negeri adalah relative kecil.

Pengetahuan tentang perilaku tabungan sangat penting dalam mendesain kebijakan untuk mendorong tabungan dan investasi. Pada umumnya perbedaan lingkungan ekonomi dinegara sedang berkembang dan negara maju merupakan perbedaan mendasar dalam perilaku tabungan. Sebagian besar literature empiris yang menganalisis perilaku tabungan antar negara memfokuskan pada kurangnya informasi yang konsisten dalam perilaku tabungan dan perbedaan perilaku

tabungan negara berkembang versus negara maju yang seringkali diabaikan oleh pemerintah negara berkembang ketika mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan tabungan dari negara industri maju.

a. Pengertian Tabungan Nasional

Tabungan nasional (national saving) dapat didefinisikan sebagai pendapatan total dalam perekonomian yang tersisa setelah dipakai untuk pengeluaran pemerintah dan konsumsi. Dalam suatu negara, investasi domestic dapat dibiayai oleh tabungan nasional dan pinjaman dari luar negeri. Total dana yang tersedia untuk membiayai investasi (I) sama dengan tabungan nasional (S+(T-G))di tambah dengan pinjaman dari luar negeri (X-M) secara matematis dapat dirumuskan :

$$I = S + (T - G) + (X - M) \dots\dots\dots(2.5)$$

Untuk mengurangi ketergantungan suatu negara terhadap bantuan dari pihak lain, tabungan nasional diutamakan sebagai sumber pembiayaan investasi domestic. Secara garis besar, tabungan nasional diciptakan oleh tiga pelaku, yaitu pemerintah, perusahaan dan rumah tangga.

Tabungan pemerintah merupakan selisih antara realisasi penerimaan dengan pengeluaran pemerintah. Tabungan perusahaan merupakan kelebihan pendapatan (laba) yang tidak dibagikan kepada pemegang sahan yang besarnya dapat diketahui dari neraca perusahaan. Sedangkan tabungan rumah tangga merupakan bagian dari pendapatan yang diterima rumah tangga yang tidak dibelanjakan untuk keperluan konsumsi. Secara matematis persamaan tabungan dapat dijabarkan sebagai berikut. Jika tabungan swasta $S = (Y-T) - C$ dan tabungan pemerintah adalah (T-G), maka tabungan nasional :

$$S + (T-G) = (Y-T) - C + (T-G) = Y - C - G \dots \dots \dots (2.6)$$

Dimana :

- S : tabungan swasta
- Y: pendapatan agregat
- T : pendapatan pajak netto
- C : konsumsi
- G : pengeluaran pemerintah.

Jika T-G bernilai positif, maka pemerintah akan mengalami budget surplus, dan sektor ini akan ditambahkan pada sektor swasta untuk menambah sumber pembiayaan investasi. Namun jika T-G bernilai negative berarti pemerintah mengalami budget defisit, dan pemerintah harus meminjam dana dari pihak lain.

b. Teori Tabungan Non Keynesian

Menurut ahli ekonomi klasik (Non Keynesian), analisa saving investment (S-I) merupakan peralatan analitis untuk menjelaskan penentuan tingkat suku bunga, dan bukannya untuk menentukan employment dan pendapatan seperti dalam pandangan Keynes. Pendekatan klasik tentang S-I yang demikian adalah sama halnya dengan masalah harga pasar, yang terjadi karena adanya interaksi antara penawaran dan permintaan suatu barang. Sejalan dengan proses terjadinya harga pasar tersebut, maka tingkat bunga terjadi dan ditentukan oleh perimbangan antara penawaran tabungan dan permintaan tabungan (untuk investasi).

Suatu pandangan unik dalam pandangan klasik adalah tingkat suku bunga yang berfungsi sebagai tenaga mekanik yang menyeimbangkan antara tabungan dan investasi tanpa memperhatikan peranan pendapatan. Kesamaan keseimbangan antara saving dan investasi adalah didasarkan pada hukum Say,

yaitu bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaan sendiri. Mendasarkan diri pada hukum Say tersebut berarti bahwa setiap saving otomatis menjadi dan sama dengan investasi. Agar tingkat suku bunga dapat berhasil menyamakan saving investasi, maka pada msing-masing kalangan pihak pasar harus ada dalam posisi persaingan (ini adalah suatu syarat umum dalam hukum Say).

Syarat lainnya adalah bahwa makin tinggi tingkat bunga, maka makin banyak orang yang ingin menabung. Artinya bahwa pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungan (Rohmad, 2018), sedangkan investor akan mencari pinjaman dan lebih banyak pada tingkat bunga yang rendah.

c. Teori Saving Investment Keynesian

Keynes percaya bahwa tingkat pengeluaran konsumsi adalah merupakan fungsi yang stabil dari disposable income (pendapatan disposibel). Pendapatan disposibel diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan pajak. Keynes tidak mengabaikan pengaruh dari variabel lain yang mempengaruhi konsumsi, tetapi Keynes percaya bahwa faktor utama yang mempengaruhi konsumsi adalah tingkat pendapatan. Dari definisi pendapatan nasional diperoleh :

$$Y = C + S + T \dots\dots\dots(2.7)$$

Dapat ditulis :

$$Yd = Y - T = C + S \dots\dots\dots(2.8)$$

Yang menunjukkan disposibel income, secara definisi konsumsi ditambah saving. Maka secara teori konsumsi pendapatan, hubungan ini secara implisist menunjukkan hubungan saving pendapatan. Secara teori Keynes mengemukakan:
 $S = -a + (1-b)Y_d$(2.9)

Dalam masalah saving-investasi, maka Keynes berpendapat bahwa income lah yang merupakan mekanik pengimbang antara saving-investasi, sehingga dalam masyarakat mungkin saja terjadi kelebihan saving atas investasi atau sebaliknya.

Sehubungan adanya kemungkinan ketidakseimbangan antara saving dan invetasi ini, Keynes mengkonstantir adanya inflasionary gap dan deflasionary gap. Apabila menurut pandangan klasik yang menentukan saving investasi adalah tingkat suku bunga, maka Keynes berpendapat bahwa tingkat suku bunga adalah suatu premi karena seseorang tidak menimbun uang (mengorbankan *liquidity preferencenya*). Keseimbangan antara saving dan investasi bukan ditentukan tingkat suku bunga, tetapi oleh tingkat pendapatan (Rohmat, 2018).

d. Konsep Kesenjangan Tabungan dan Investasi

Terjadinya defisit maupun surplus dalam tabungan dan investasi merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara tabungan nasional yang berhasil dihimpun, baik dari masyarakat dan swasta melalui mobilitas modal perbankan dan lembaga keuangan lainnya, maupun dari pemerintah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dengan anggaran rutin dan besarnya kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai investasi, baik yang dilakukan pihak swasta maupun pemerintah. Kesenjangan tabungan dan investasi dapat

bernilai positif (surplus), bernilai negative (defisit) ataupun bernilai nol (seimbang).

Kesenjangan tabungan dan investasi disebabkan karena pada salah satu pihak tabungan domestic rendah, sedangkan di pihak lain kebutuhan dana untuk membiayai investasi domestic semakin besar dan meningkat tiap tahun mengikuti pertumbuhan populasi dan kebutuhan pasr. Oleh karena itu terbentuklah kesenjangan tabungan dan investasi : $S-I < 0$ ($S < I$). hal ini menandakan bahwa negara yang bersangkutan mengalami saving-investment gap.

Selisih antara tabungan domestic dan investasi domestic yang disebut arus modal keluar netto (net capital outflow) disebut juga investasi asing netto (net foreign investment). Jika arus modal keluar netto kota positif, maka tabungan kita melebihi investasi dan kita meminjamkan kelebihanannya kepada pihak asing. Jika arus modal keluar netto kita negative, maka investasi kita melebihi tabungan dan kita harus meminjam dari luar negeri, artinya jika investasi melebihi tabungan maka dikatakan defisit.

2.1.4 Teori Investasi

a. Pengertian Investasi

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran pemerintah untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Investasi adalah suatu komponen dari PDB.

Menurut Samuelson (2004 : 198), investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan

barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi diwaktu mendatang.

Investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran atau pembelanjaan yang dapat berupa jenis barang modal, bangunan, peralatan modal, dan barang-barang inventaris yang digunakan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga terjadi peningkatan output yang dihasilkan dan tersedia untuk masyarakat.

b. Teori Investasi

Dalam jangka panjang pertumbuhan investasi berpengaruh pada bertambahnya *stock capital* dan selanjutnya menaikkan produktivitas. Di negara yang tingkat penganggurannya tinggi, seperti Indonesia sekarang, angkatan kerja yang menganggur dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan modal.

1. Teori Neo Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Semakin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok modal rata-rata tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, *Sollow* dan *Swan* memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010 : 88-89).

2. Teori Harrod-Domar. Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum

klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar (Sadono, 2007: 256-257).

c. Jenis Investasi

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu : Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing yang disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsi pun bertambah dan bertambah pula *Effective demand*. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut *induced investment*.

Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari 2 macam, yaitu : PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari

luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri.

1. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Salvatore (1997) menjelaskan bahwa PMA terdiri atas :

- a. Investasi portofolio (*portofolio investmen*), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset financial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau financial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.
- b. Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya. Winata (2004) berpendapat bahwa investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor. Di negara maju seperti Amerika, modal asing (khususnya dari Jepang dan Eropa Barat) tetap dibutuhkan guna memacu pertumbuhan ekonomi domestic, menghindari kelesuan pasar dan penciptaan kesempatan kerja. Apalagi di negara

berkembang seperti Indonesia, modal asing sangat diperlukan terutama sebagai akibat dari modal dalam negeri yang tidak mencukupi. Untuk itu berbagai kebijakan di bidang penanaman modal perlu diciptakan dalam upaya menarik pihak luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Masuknya PMA di Indonesia diatur oleh pemerintah dalam UU No 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan dilengkapi serta disempurnakan oleh UU No 11 Tahun 1970 juga tentang penanaman modal asing. UU itu didukung oleh berbagai kemudahan yang dilengkapi dengan berbagai kebijakan dalam paket-paket deregulasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menarik investasi didalam memenuhi kebutuhan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sementara itu, rencana PMA yang disetujui pemerintah adalah nilai investasi proyek baru, perluasan, dan alih status yang terdiri atas saham peserta Indonesia.

2. Penanamana Modal Dalam Negeri (PMDN)

PMDN adalah bentuk upaya menambah modal untuk pembangunan melalui investor dalam negeri. Modal dari dalam negeri ini bisa didapat baik baik itu dari pihak swasta ataupun dari pemerintah. Kebijakan tentang rencana PMDN ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No 6 Tahun 1968, kemudian disempurnakan dengan diberlakukannya UU No 12 Tahun 1970. Rencana PMDN yang disetujui pemerintah adalah nilai investasi baru perluasan, dan alih status, yang terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Jumlah kumulatif rencana PMDN adalah jumlah seluruh rencana PMDN yang disetujui pemerintah sejak tahun 1968 dengan memperhitungkan pembatalan, perluasan, perubahan,

penggabungan, pencabutan, dan pengalihan status dari PMDN ke PMA atau sebaliknya.

Penggolongan investasi berdasarkan pembentukan modal terdiri dari 2 jenis investasi yaitu : investasi bruto, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang belum dikurangi depresiasi. Investasi neto adalah investasi bruto dikurangi depresiasi (jumlah perkiraan sejauh mana barang modal telah digunakan dalam periode yang bersangkutan).

Investasi berdasarkan timbulnya : (1) investasi otonomi berarti pembentukan modal yang tidak dipengaruhi pendapatan nasional; (2) investasi terpengaruh (*induced investment*) investasi yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Menurut Sadono Sukirno (2003: 5) investasi secara luas bahwa dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi meliputi : (1) seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang dan modal dalam pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri; (2) pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah tempat tinggal dan (3) pertumbuhan dalam nilai stok barang perusahaan berupa bahan mentah, barang yang belum selesai diproses dan barang jadi.

2.1.5 Teori Konsumsi

Pengeluaran konsumsi terdiri atas konsumsi pemerintah (*government consumption*) dan konsumsi rumah tangga masyarakat (*household consumption/private consumption*). Pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam total pengeluaran agregat. Misalnya, porsi pengeluaran rumah tangga di Indonesia pada tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) mencapai sekitar 60% pengeluaran agregat. Bahkan, pada awal tahun 1970-an porsi pengeluaran rumah tangga mencapai angka sekitar 70% dari

pengeluaran agregat. Sedangkan pengeluaran pemerintah umumnya berkisar antara 10% sampai 20% pengeluaran agregat. Mengingat porsi yang besar tersebut, maka konsumsi rumah tangga mempunyai pengaruh yang besar pula terhadap stabilitas perekonomian.

Berbeda dengan konsumsi pemerintah yang bersifat eksogenus, konsumsi rumah tangga bersifat endogenus. Dalam arti, besarnya konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan faktor-faktor lain yang dianggap mempengaruhinya. Karena itu dapat menyusun teori dan model ekonomi yang menghasilkan pemahaman tentang hubungan tingkat konsumsi dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Teori dan model tersebut dikenal sebagai teori dan model konsumsi. Teori dan model konsumsi telah bermanfaat bagi pengelolaan perekonomian makro.

Perkembangan masyarakat yang begitu cepat menyebabkan perilaku-perilaku konsumsi juga berubah cepat. Ini dibuktikan dengan munculnya teori-teori konsumsi yang lebih baru dan canggih, terutama karena mempertimbangkan unsure ketidakpastian, menggunakan model dinamis, peralatan analisisnya ekonometrika. Pada dasarnya faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah pendapatan, dimana korelasi keduanya bersifat positif, yaitu semakin tinggi pendapatan (Y) maka konsumsinya (C) juga makin tinggi (Manurung, 2008:257-258).

a. Teori Irving Fisher dan Pilihan Antarwaktu

Ekonom Irving Fisher mengembangkan model yang digunakan para ekonom untuk menganalisis bagaimana konsumen yang berpandangan ke depan dan rasional membuat pilihan antarwaktu yaitu, pilihan yang meliputi periode waktu

yang berbeda. Model Fisher menghilangkan hambatan-hambatan yang dihadapi konsumen, preferensi yang mereka miliki, dan bagaimana hambatan-hambatan serta preferensi ini bersama-sama menentukan pilihan mereka terhadap konsumsi dan tabungan (Mankiw, 2006: 451).

1) Batas Anggaran Antarwaktu

Sebagian orang akan lebih suka meningkatkan kuantitas atau kualitas barang dan jasa yang mereka konsumsi, memakai pakaian yang baik, menikmati hidangan di restoran yang lebih baik, atau menonton lebih banyak film. Alasan orang mengkonsumsi lebih sedikit daripada yang mereka inginkan adalah karena konsumsi mereka dibatasi oleh pendapatan. Dengan kata lain, konsumen menghadapi batasan dalam menentukan berapa banyak yang mereka bisa belanjakan, yang disebut batas/kendala anggaran (*budget constraint*). Ketika mereka memutuskan berapa banyak akan mengkonsumsi hari ini versus berapa banyak akan menabung untuk masa depan, mereka menghadapi batas anggaran antarwaktu, yang mengukur sumber daya total yang tersedia untuk konsumsi hari ini dan dimasa depan. Langkah pertama kita dalam mengembangkan model Fisher adalah mengkaji batasan ini dalam beberapa rincian.

Untuk mempermudah, kita kaji keputusan yang dihadapi konsumen yang hidup selama dua periode. Periode satu menunjukkan masa muda konsumen, dan periode kedua menunjukkan masa tua konsumen. Konsumen tersebut menghasilkan pendapatan Y_1 serta mengkonsumsi C_1 dalam periode 1, dan menghasilkan pendapatan Y_2 dan mengkonsumsi C_2 dalam periode 2. Seluruh variabelnya riil yaitu, disesuaikan dengan inflasi. Karena konsumen mempunyai

peluang untuk meminjam dan menabung, maka konsumsi dalam periode tunggal bisa jadi lebih besar atau lebih kecil dari pendapatan dalam periode tersebut.

Perhatikanlah bagaimana pendapatan konsumen dalam dua periode membatasi konsumsi dalam dua periode itu. Dalam periode pertama, tabungan sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi, yaitu :

$$S = Y_1 - C_1 \dots \dots \dots (2.10)$$

Dimana S adalah tabungan. Dalam periode kedua, konsumsi sama dengan akumulasi tabungan, termasuk bunga tabungan, ditambah pendapatan periode kedua, yaitu :

$$C_2 = (1 + r)S + Y_2 \dots \dots \dots (2.11)$$

Dimana r adalah tingkat bunga riil. Sebagai contoh, jika tingkat bunga adalah 5 persen, maka untuk setiap \$1 tabungan dalam periode satu, konsumen menikmati konsumsi ekstra sebesar \$1,05 dalam periode dua. Karena tidak ada periode ketiga, konsumen tidak menabung pada periode kedua.

Ingatlah bahwa variabel S bisa menunjukkan tabungan atau pinjaman dan persamaan ini berlaku dalam kedua kasus. Jika konsumsi periode pertama kurang dari pendapatan periode pertama, berarti konsumen menabung, dan $S > 0$. Jika konsumsi periode pertama melebihi pendapatan pertama, konsumen meminjam, dan S kurang dari nol. Untuk mempermudah, kita asumsikan bahwa tingkat bunga pinjaman sama dengan tingkat bunga tabungan.

Untuk menderivasi batas anggaran konsumen, kombinasikanlah dua persamaan diatas. Gantilah persamaan pertama untuk S ke dalam persamaan kedua untuk mendapatkan

$$C_2 = (1 + r)(Y_1 - C_1) + Y_2 \dots \dots \dots (2.12)$$

Untuk membuat persamaan tersebut lebih mudah diinterpretasikan, kita harus mengubah posisinya. Untuk menyatukan seluruh symbol konsumsi, kita geser $(1+r) C_1$ dari sisi kanan ke sisi kiri persamaan untuk mendapatkan

$$(1 + r) C_1 + C_2 = (1 + r)Y_1 + Y_2 \dots \dots \dots (2.13)$$

Sekarang bagilah kedua sisi dengan $1 + r$ untuk mendapatkan

$$C_1 + \frac{C_2}{1+r} = Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} \dots \dots \dots (2.14)$$

Persamaan ini menghubungkan konsumsi selama dua periode dengan pendapatan dalam dua periode. Persamaan itu adalah cara standar untuk menunjukkan batasan anggaran antarwaktu konsumen.

Batas anggaran konsumen mudah diinterpretasikan. Jika tingkat bunga adalah nol, batas anggaran menunjukkan bahwa konsumsi total dalam kedua periode tersebut sama dengan pendapatan totalnya. Dalam kasus biasa dimana tingkat bunga lebih besar dari nol, konsumsi dan pendapatan masa depan didiskontokan oleh faktor $1 + r$. Pendiskontoan ini berasal dari tabungan. Esensinya, karena konsumen mendapatkan bunga atas pendapatan saat ini yang ditabung, pendapatan masa depan lebih kecil nilainya dibandingkan pendapatan saat ini. Demikian pula, karena konsumsi masa depan disisihkan untuk tabungan yang mendapatkan bunga, maka konsumsi masa depan lebih murah dibandingkan konsumsi sekarang. Faktor $1/(1 + r)$ adalah harga konsumsi periode kedua yang diukur dalam bentuk konsumsi periode pertama, faktor itu adalah jumlah konsumsi periode pertama yang harus konsumen jalani untuk mendapatkan 1 unit konsumsi periode kedua.

b. Franco Modigliani dan Hipotesis Daur-Hidup

Dalam serangkaian makalah yang ditulisnya pada tahun 1950-an, Franco Modigliani dan kolaboratornya Albert Ando dan Richard Brumberg menggunakan model perilaku konsumen Fisher untuk mempelajari fungsi konsumsi. Salah satu tujuan mereka adalah memecahkan teka-teki konsumsi yaitu, menjelaskan adanya bukti yang saling bertentangan ketika fungsi konsumsi Keynes dimasukkan kedalam data. Menurut model Fisher, konsumsi bergantung pada pendapatan seumur hidup seseorang. Modigliani menekankan bahwa pendapatan bervariasi secara sistematis selama kehidupan seseorang dan tabungan membuat konsumen dapat mengalihkan pendapatan dari masa hidupnya ketika pendapatan tinggi ke masa hidup ketika pendapatan rendah. Interpretasi perilaku konsumsi ini mendasari hipotesis daur-hidup nya (Mankiw,2006:460-461).

1) Hipotesis

Satu alasan penting bahwa pendapatan bervariasi selama kehidupan seseorang adalah masa pensiun. Kebanyakan orang merencanakan akan berhenti bekerja pada usia kira-kira 65 tahun, dan mereka berekspektasi bahwa penghasilan mereka akan turun ketika pensiun. Tetapi mereka tidak ingin standar kehidupannya mengalami penurunan besar, sebagaimana diukur dengan konsumsi mereka. Untuk mempertahankan konsumsi setelah berhenti kerja, orang-orang harus menabung selama masa-masa kerja mereka. Mari kita lihat apakah motif untuk menabung ini berpengaruh pada fungsi konsumsi.

Perhatikanlah seorang konsumen yang berharap hidup selama T tahun lagi, memiliki kekayaan W , dan berharap menghasilkan pendapatan Y sampai ia

pensiun selama R tahun dari sekarang. Berapakah tingkat konsumsi yang akan dipilih konsumen tersebut jika ia ingin mempertahankan tingkat konsumsi yang merata selam hidupnya?.

Sumber daya seumur hidup konsumen terdiri dari kekayaan awal W dan penghasilan seumur hidup $R \times Y$. (Untuk mempermudah, kita mengasumsikan tingkat bunga sebesar nol, jika tingkat bunga lebih besar dari nol, kita perlu memperhitungkan bungan tabungan). Konsumen bisa membagi sumberdaya seumur hidupnya di antara T tahun-tahun sisa hidupnya. Kita asumsikan bahwa ia ingin mencapai jalur konsumsi yang paling merata selama hidupnya. Karena itu, ia membagi total $W + RY$ ini secara sama diantara T tahun dan setiap tahun mengkonsumsi

$$C = (W + RY)/T \dots\dots\dots(2.15)$$

Kita bisa menulis fungsi konsumsi seseorang sebagai

$$C = (1/T) W + (R/T) Y \dots\dots\dots(2.16)$$

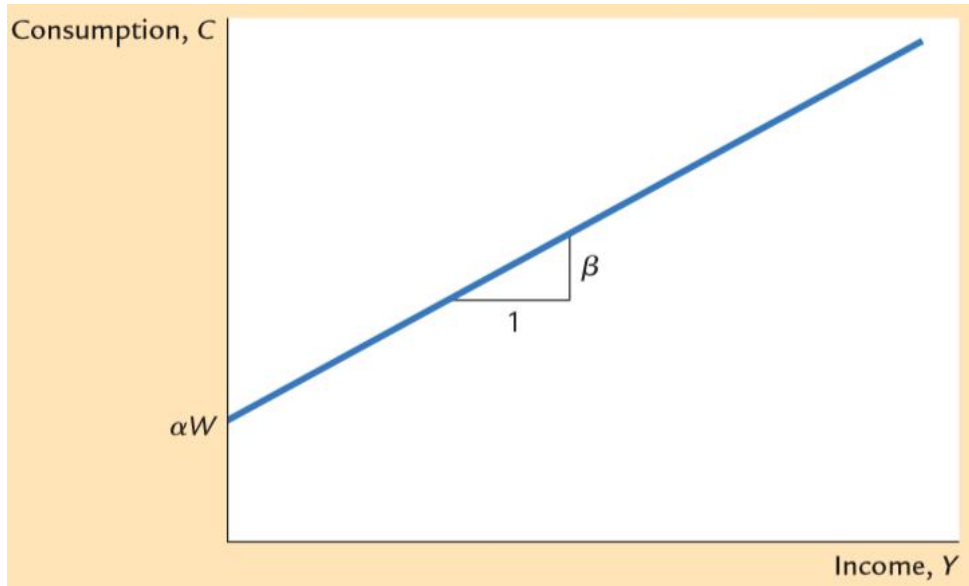
Jika setiap orang dalam perekonomian merencanakan konsumsi seperti ini, maka konsumsi agregat serupa dengan fungsi konsumsi individual. Biasanya, konsumsi agregat bergantung pada kekayaan dan pendapatan. Oleh karena itu, fungsi konsumsi perekonomian adalah

$$C = \alpha W + \beta Y \dots\dots\dots(2.17)$$

Dimana parameter α adalah kecenderungan mengkonsumsi marjinal dari kekayaan, dan parameter β adalah kecenderungan marjinal dari pendapatan.

2) Implikasi

Gambar 2.1
Fungsi Konsumsi Daur-Hidup



Sumber :Mankiw 2006

Gambar 2.1 menunjukkan hubungan antara konsumsi dan pendapatan yang diprediksikan oleh model daur-hidup. Untuk setiap tingkat kekayaan W tertentu, model tersebut menghasilkan fungsi konsumsi konvensional. Namun demikian ingatlah bahwa perpotongan fungsi konsumsi, yang menunjukkan apa yang akan terjadi dengan konsumsi jika pendapatan terus menurun ke tingkat nol, bukanlah nilai tetap. Perpotongan disini adalah αW dan, dengan demikian bergantung pada tingkat kekayaan.

Model daur-hidup dari perilaku konsumen ini dapat memecahkan teka-teki konsumsi. Menurut fungsi konsumsi daur hidup, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata adalah

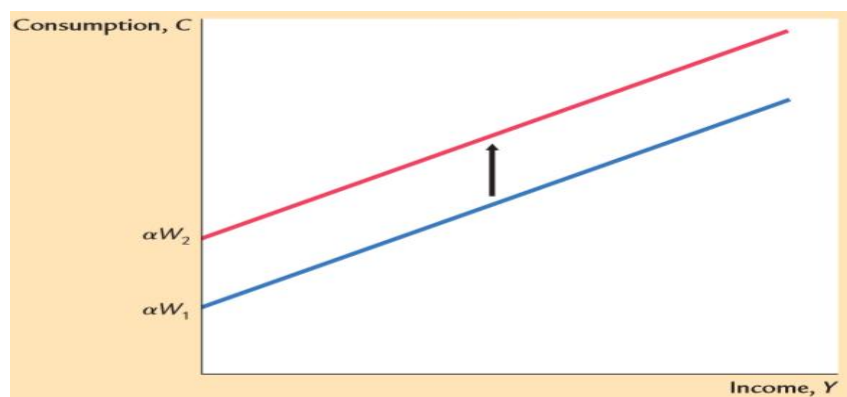
$$C/Y = \alpha (W/Y) + \beta \dots \dots \dots (2.18)$$

Karena kekayaan tidak bervariasi secara proporsional dengan pendapatan dari orang ke orang atau dari tahun ke tahun, kita seharusnya menyadari bahwa tingginya pendapatan terkait dengan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata yang rendah ketika meneliti data antar individu atau selama periode waktu yang singkat. Namun, selama periode waktu yang panjang, kekayaan dan pendapatan tumbuh sekaligus, yang menghasilkan rasio W/Y yang konstan dan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata juga konstan.

Dalam jangka panjang, ketika kekayaan naik, fungsi konsumsi bergeser keatas, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 2.2

Gambar 2.2

Grafik Perubahan Kekayaan Menggeser Fungsi Konsumsi



Sumber: Mankiw, 2006

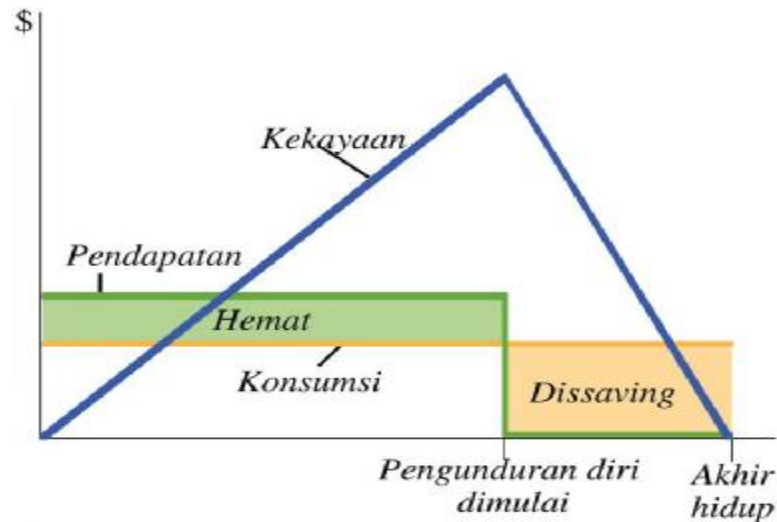
Pergeseran ke atas ini mencegah turunnya kecenderungan mengkonsumsi rata-rata ketika pendapatan naik. Dengan demikian, Modigliani menjawab teka-teki yang diberikan data oleh Simon Kuznets.

Model daur-hidup juga membuat banyak prediksi lain. Yang paling penting, model itu memprediksikan bahwa tabungan bervariasi selama kehidupan seseorang. Jika seseorang memulai masa dewasanya tanpa kekayaan, ia akan mengakumulasi kekayaan selama masa-masa kerjanya dan mengurangi

kekayaannya selama masa-masa pensiun. Gambar 2.3 menggambarkan pendapatan, konsumsi, dan kekayaan konsumen selama masa dewasanya.

Gambar 2.3

Fungsi Konsumsi, Pendapatan, dan Kekayaan Selama Daur-Hidup



Sumber : Mankiw, 2006

Jika konsumen meratakan konsumsi selama hidupnya sebagaimana ditunjukkan oleh garis konsumsi horizontal, dia akan menabung dan mengakumulasi kekayaan selama masa kerjanya dan kemudian menghabiskan tabungan dan mengurangi kekayaannya selama pensiun. Menurut hipotesis daur-hidup, karena orang-orang ingin meratakan konsumsi selama hidupnya, maka kaum muda yang sedang bekerja menabung, sedangkan kaum tua yang pensiun menghabiskan tabungan.

2.1.6 Teori Pendapatan Nasional

Menurut Dumairy (1996:37) Pendapatan Nasional dapat berarti sempit dan luas, Dalam arti sempit pendapatan nasional adalah terjemahan langsung dari national income. Sedangkan arti luas pendapatan nasional dapat merujuk pada Produk Domestic Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP): atau merujuk ke Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP):

Produk Nasional Neto (PPN) atau Net National Product (NNP) atau merujuk ke Pendapatan Nasional (PN) alias National Income (NI).

Pendapatan Nasional dapat juga diartikan sebagai Produksi Nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan seluruh anggota masyarakat suatu Negara dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun

A. Konsep Pendapatan Nasional

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara atau domestic selama satu tahun.

GDP = Pendapatan Masyarakat DN (Dalam Negeri) + Pendapatan Asing

$$\text{DN (Dalam Negeri)} \dots \dots \dots (2.19)$$

Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan ataupun instansi asing yang terkait, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu Negara atau domestic tersebut (Dumairy 1996:37).

2. Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) merupakan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu Negara (Nasional) selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga Negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. (Dumairy 1996:37).

GNP = Pendapatan WNI DN + Pendapatan WNI LN (Luar Negeri) –

$$\text{Pendapatan Asing DN} \dots \dots \dots (2.20)$$

3. Produk Nasional Neto (NNP)

Penyusutan adalah pergantian barang modal bagi barang atau peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi yang umumnya bersifat taksiran, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan relatif kecil (Dumairy 1996:37)

4. Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. (Dumairy 1996:38)

$$\text{NNI} = \text{NNP} - \text{Pajak tidak langsung} \dots \dots \dots (2.21)$$

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan dan lain-lain.

5. Pendapatan Perorangan (PI)

Pendapatan perorangan (Personal Income) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji PNS maupun pendapatan pengusaha yang di dapatkan secara berantai. (Dumairy 1996:38)

$$\text{PI} = \text{NNI} - \text{Pajak Perusahaan} - \text{Iuran} - \text{Laba ditahan} + \text{Transfer Payment} \dots \dots \dots (2.22)$$

Transfer Payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, Seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan penganggaran, dan sebagainya.

6. Pendapatan yang di belanjakan

Disebut juga sebagai Disposable Income yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi Investasi. (Dumairy 1996:39)

$$DI = PI - \text{pajak Langsung} \dots\dots\dots(2.23)$$

Pajak langsung yang bebannya tidak dapat dialihkan dengan pihak lain seperti pajak pendapatan.

2.1.8 Infrastruktur

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telepon dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari *public capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Familoni (2004:16) menyebut infrastruktur sebagai *basic essential service* dalam proses pembangunan.

Dengan memahami sifat infrastruktur sebagai barang publik, maka berdasarkan teori infrastruktur memiliki karakter eksternalitas. Hal ini sesuai dengan sifatnya yaitu dimana infrastruktur disediakan oleh pemerintah dan bagi setiap pihak yang menggunakan infrastruktur tidak memberikan bayaran secara langsung atas penggunaan infrastruktur. Canning dan Pedroni (2004:11) menyatakan bahwa infrasruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan fasilitas yang diberikan oleh

berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktifitas semua input proses produksi.

2.2 Regulasi

2.2.1 Dana Pensiun

Salah satu penyiapan yang terpenting bagi setiap karyawan adalah menyiapkan diri untuk masa pensiun. Penyiapan tersebut berbentuk mentalitas dan financial. Secara mentalitas mempersiapkan agar seseorang tidak mengalami *post power syndrome*, dan secara financial mempersiapkan ketersediaan dana dalam jumlah selalu mencukupi atau aman. Sehingga dapat menikmati hidup dengan layak walaupun sudah tidak lagi aktif dalam bekerja.

Di Indonesia, melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 250/KMK.00111985 tanggal 6 Maret 1985 telah memberikan perlakuan khusus dana pensiun, sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan minat swasta untuk penyelenggaraan program pensiun guna memberikan kesejahteraan dan jaminan hidup hari tua kepada karyawannya. Dan dana pensiun ini dapat dikategorikan sebagai salah satu lembaga keuangan lainnya di Indonesia (Fahmi, 2014:175).

a. Definisi Dana Pensiun

Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Untuk definisi dana pensiun dapat dilihat pada Bab 1 Pasal 1 dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang menyebutkan. “Dana Pensiun

adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”(Fahmi, 2014:176)

Adapun pengertian secara umum dana pensiun adalah sebuah keputusan yang dibuat untuk menyiapkan sejumlah dana atau membangun perencanaan keuangan agar dana tersebut dapat dipakai ketika pensiun dalam membiayai masa-masa pensiun. Artinya ketika masa pensiun dialami seseorang tidak merasa kehilangan secara mentalis bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan dalam menjalani kehidupan disebabkan perbedaan masa kerja yang penuh dengan berbagai aktivitas namun ketika pensiun tanpa ada kegiatan, termasuk tanpa memiliki pendapatan financial.

Namun dengan adanya dana pensiun baik yang dikelola oleh sebuah lembaga maka setiap bulan atau waktunya ia akan terus dapat memperoleh uang pensiun atau minimal sejumlah uang pesangon yang akan membantunya untuk bisa memakainya atau menginvestasikan pada tempat-tempat yang memiliki nilai *profitable*. *Profitable* artinya berinvestasi pada tempat yang nilai finansialnya akan terus mengalami kenaikan.

Termasuk bisa saja ketika pensiun ia bisa membuka usaha. Apalagi dalam usia pensiun yang masih berumur 56 atau 58 tahun tentunya ini usia yang masih tergolong sehat dan produktif untuk angka harapan hidup rakyat Indonesia untuk saat ini yang sudah jauh lebih sehat dibanding pada masa dahulunya.

b. Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun

Penyelenggaraan dana pensiun tidak bisa dilihat secara sederhana, di sana memiliki berbagai dimensi tujuan. Secara umum ada beberapa tujuan dilakukannya penyelenggaraan dana pensiun, yaitu :

- 1) Bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada hari tua. Sering dimasa pensiun setiap karyawan ingin menikmati hari-hari tua dengan lebih santai dan tenang termasuk bisa memiliki waktu beribadah yang lebih banyak. Maka dengan adanya dana pensiun diharapkan ia akan bisa menikmati semua itu dengan baik.
- 2) Membangun sikap persaudaraan dan kekeluargaan. Dengan adanya penyelenggaraan dana pensiun diharapkan terbangun rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang tinggi antara mereka yang masih aktif bekerja dan yang telah purna bakti dalam menjalankan pekerjaan. Ada prinsip yang harus diingat bahwa generasi sekarang adalah generasi penerus dari generasi sebelumnya. Dan salah satu warisan tersebut tidak melupakan pada orang-orang yang telah bekerja dan berbakti demi kemajuan organisasi, karena pada prinsipnya setiap orang yang diberi umur panjang pasti akan menjalani masa pensiun.
- 3) Membangun sistem manajemen kinerja yang sistematis. Sebuah organisasi yang baik berusaha menampilkan kinerja yang baik. Salah satu ukuran kinerja organisasi dilihat dari kekuatan organisasi tersebut yang terbangun secara solid. Maka penyelenggaraan dana pensiun dilakukan sebagai bentuk menjamin terbentuknya kekompakan internal organisasi secara jangka panjang, dalam artian manajemen perusahaan tidak hanya menjamin para kesejahteraan karyawan semenjak masih bekerja namun juga hingga karyawan tersebut telah pensiun dari perusahaan.
- 4) Membangun image positif. Salah satu reputasi atau kewibawaan sebuah organisasi dilihat pada kemampuannya menjamin setiap orang yang berada

diorganisasi tersebut merasa nyaman dan bahagia. Sehingga kondisi dan situasi tersebut member informasi positif kepada para mitra bisnis dan stakeholder lainnya. Tentunya ini akan memberikan citra dan image positif pada perusahaan tersebut.

c. Tipe dan Asas Dana Pensiun

Ada dua tipe dasar dari dana pensiun dan digunakan secara luas, program pensiun iuran dana pasti (*defined contribution plan*) dan program pensiun keuntungan pasti (*defined benefit plan*). Dalam program pensiun iuran pasti, sponsor program pensiun hanya bertanggung jawab untuk membuat/menetapkan kontribusi (iuran) dalam jumlah tertentu ke dalam program pensiun atas nama peserta pensiun yang memenuhi syarat. Jumlah uang yang dikontribusikan biasanya didasarkan pada persentase dari gaji karyawan atau persentase dari laba.

Jika jumlah gaji besar maka besar pula penerimaan pensiunnya, namun jika gaji kecil maka kecil juga dana pensiun yang akan diterima nantinya. Jumlah gaji besar dan kecil sangat tergantung pada masa kerja dan juga posisi dimana seseorang di tempatkan, seperti jabatan atau posisi dimana ia selama bekerja.

Dalam program pensiun keuntungan pasti, sponsor program pensiun setuju untuk melakukan pembayaran-pembayaran dalam jumlah tertentu kepada karyawan-karyawan yang memenuhi syarat setelah mereka pensiun (dan sejumlah pembayaran kepada ahli waris jika karyawan meninggal sebelum pensiun). Pembayaran pensiun ditentukan oleh suatu formula yang biasanya mempertimbangkan masa kerja dan penghasilan karyawan.

Berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 1992 penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut.

- 1) Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya.
- 2) Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan.
- 3) Asas pembinaan dan pengawasan.
- 4) Asas penundaan manfaat.
- 5) Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun.

d. Lembaga Penyelenggara Dana Pensiun

Dana pensiun bukan hanya dapat dimiliki oleh pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah lainnya. Namun saat ini setiap orang yang bekerja memiliki peluang untuk mendapatkan dana pensiun asal mereka mengetahui lembaga penyelenggara dana pensiun tersebut.

Memang jika kita melihat sudah sepantasnya kampanye tentang dana pensiun digalakkan, dengan tujuan agar kehidupan di hari tua untuk seluruh rakyat di negara Indonesia dapat merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Memahami dana pensiun artinya memahami bagaimana membangun perencanaan untuk hari tua yang lebih baik dan terjamin.

Saat ini memang harus diakui jika kampanye tentang dan pensiun masih kurang, sehingga menyebabkan masyarakat juga tidak mengerti ke lembaga mana ia harus mengurus dana pensiunnya tersebut. Terdapat dua lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun, yaitu pemberi kerja dan lembaga keuangan.

Lembaga Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) didirikan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran past, bagi kepentingan karyawan yang menjadi peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Lembaga ini dibentuk oleh orang atau badan

yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri dan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan seluruh karyawan sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

Salah satu tujuan dari pembentukan DPPK adalah untuk membantu karyawan di berbagai perusahaan agar dapat bekerja serta memperoleh pensiun yang layak di hari tua mereka nantinya. Sehingga dalam menjalani aktivitas bekerja mereka menjadi lebih yakin serta bersungguh-sungguh dengan kata lain terbangunnya motivasi kerja. Memang harus diakui jika motivasi kerja juga dihubungkan dengan reward yang akan diterima. Maka dana pensiun dapat dianggap reward yang akan diterima nantinya ketika karyawan tersebut pensiun suatu saat nanti.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dapat dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa yang memiliki kemampuan menyelenggarakan program pensiun pasti bagi perorangan. Peserta dana pensiun lembaga keuangan ini adalah masyarakat, baik yang terikat sebagai karyawan pada perusahaan tertentu maupun perorangan yang tidak terikat pada badan usaha apapun.

e. Peserta Dana Pensiun

Pada prinsipnya setiap karyawan bisa menjadi peserta atau anggota dana pensiun, asal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Penetapan syarat tersebut sangat tergantung pada keputusan organisasi tempat yang bersangkutan bekerja. Walaupun secara umum penegasan tentang peserta dana pensiun ini telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1992.

Bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah atau di perusahaan yang memiliki reputasi bagus tentunya konsep tentang dana pensiun sudah dijelaskan

semenjak awak sekali ketika mereka bekerja. Karena penjelasan semenjak awal bertujuan untuk memberikan kejelasan secara baik dan tegas kepada para peserta agar merasa yakin terhadap masa depan mereka nanti ketika bekerja disana.

Syarat-syarat untuk menjadi peserta dana pensiun yang secara umum ditetapkan oleh suatu organisasi adalah :

- 1) Tercatat sebagai karyawan tetap dan memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan baik dalam bentuk 80% maupun 100%.
- 2) Berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah/berkeluarga. Tujuannya penetapan seperti ini yaitu agar yang bersangkutan memperlihatkan sikap akil baligh atau kedewasaannya.
- 3) Memiliki masa kerja minimal 1 tahun
- 4) Disetujui oleh pihak manajemen perusahaan berdasarkan criteria dari kelengkapan administrasi dan kelayakan kepribadian.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian & Nama Peneliti	Metode Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
1	The Funded Pension Scheme and Economic Growth in Nigeria Adesoji Farayibi (2016)	ECM, dan OLS	RGDP, CPSPU, CPSPP, TCPS, MC, dan TPFA	CPSPU, TPFA, dan CPSPP berpengaruh positif dan signifikan terhadap RGDP. Dan TCPS dan MC berpengaruh negative dan signifikan terhadap RGDP

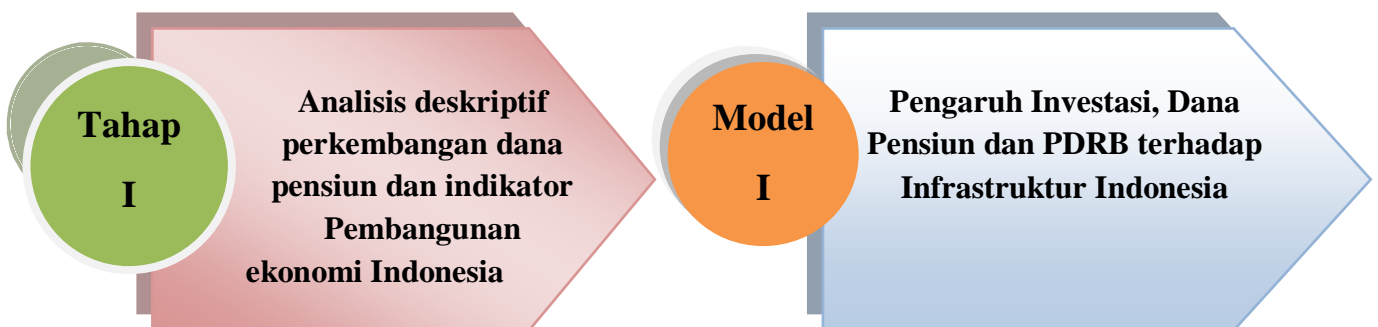
2	Pension Fund and Economic Growth : Evidence from OECD Contries Yilmaz Bayar, O.F. Ozturk (2016)	CIPS, Kausalitas Dumitrescu and Hurlin	GRW, PENS, DCRD	Kausalitas satu arah dari pengembangan keuangan untuk pertumbuhan ekonomi, dan kausalitas dua arah antara dana pensiun dan pertumbuhan ekonomi
3	The Relationship Between Pension Fund Assets ang Economic Growth in Kenya Wanjala Cristopher Mungoma (2013)	Regresi SPSS	Y, X _i	Korelasi menunjukkan bahwa asset pensiun secara positif dan sangat berkorelasi dengan GDP pada +0.97 yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berhubungan sempurna dalam linear positif

2.4 Kerangka Konseptual

Secara umum, terdapat beberapa indikator yang dianggap mempengaruhi Infrastruktur, yaitu : (1) Dana Pensiun, (2) Belanja Modal, dan (3) Investasi. Ketiga variabel tersebut akan mempengaruhi tingkat pembangunan ekonomi Indonesia.

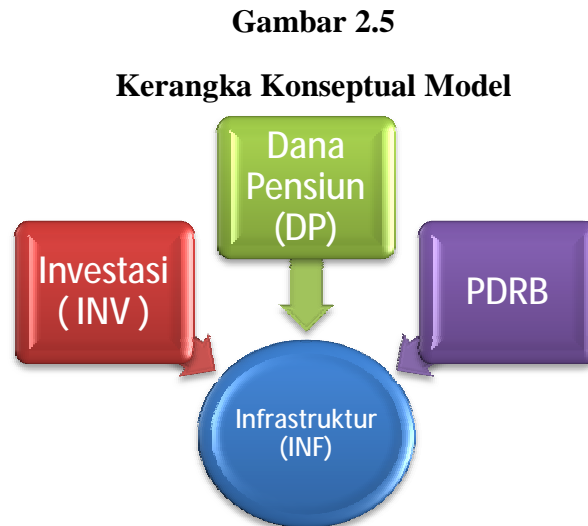
2.4.1 Kerangka Analisis Pembangunan Ekonomi Indonesia

Gambar 2.4
Kerangka Penelitian



2.4.2 Model I Kerangka Analisis Pengaruh Investasi, Belanja Modal, Dana Pensiun dan PDRB terhadap Infrastruktur di Indonesia.

Model 1 :



Dalam model ini, variabel INV, BM, DP dan PDRB merupakan variabel bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap Infrastruktur, yang dimana INF merupakan variabel terikat.

2.5 Hipotesa

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori, dan penelitian-penelitian terdahulu, maka didapat hipotesa sebagai berikut :

1. Di duga terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Investasi (INV), Dana Pensiun (DP) dan PDRB terhadap Infrastruktur (INF).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah mini riset kuantitatif, yang dimana bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antara variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah. Data yang disajikan adalah data *cross section* dan *time series* dengan metode data panel yang menggunakan program *EViews 9*. Data yang akan diteliti adalah 10 provinsi di Indonesia yaitu (Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan) dan waktu penelitian yang dihimpun adalah pada tahun 2015 sampai 2017. Adapun variabel-variabel yang akan diamati adalah Infrastruktur jalan, Investasi, Belanja Modal, Dana Pensiun dan PDRB di 10 provinsi Indonesia.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan.

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
INF (Infrastruktur Jalan)	Total Panjang Jalan Nasional dalam kondisi baik dan sedang menurut Provinsi (km)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat www.pu.go.id
INV (Investasi)	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi (triliun rupiah)	BPS (Badan Pusat Statistik) www.bps.go.id
DP (Dana Pensiun)	Total Investasi Dana Pensiun berdasarkan provinsi (triliun rupiah)	OJK (Otoritas Jasa Keuangan) www.ojk.go.id
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 menurut lapangan usaha (triliun rupiah)	BPS Provinsi (Badan Pusat Statistik) www.bps.go.id

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat data Infrastruktur, Dana Pensiun, Investasi, dan PDRB, serta Indikator Pembangunan Ekonomi di 10 Provinsi di Indonesia yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Badan Pusat Statistik per Provinsi.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan selama 4 bulan yaitu Desember 2018 sampai Maret 2019.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh langsung dari hasil publikasi yang berasal dari *website-website* resmi, seperti Badan Pusat Statistik per Provinsi (BPS per

Provinsi), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr RI).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui *website-website* resmi Badan Pusat Statistik per Provinsi (BPS per Provinsi), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupr RI). Dengan objek penelitian provinsi di Indonesia dan dengan kurun waktu 2015 sampai 2017.

3.6 Model Estimasi

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode data panel. Maka model ekonometrik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$INF_{rt} = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot INV_{rt} + \alpha_2 \cdot DP_{rt} + \alpha_3 \cdot PDRB_{rt} + \epsilon_{rt} \dots \dots \dots (3.1)$$

- Dimana :
- INF_{rt} = Infrastruktur Jalan Nasional pada tahun t (km)
 - INV_{rt} = Investasi PMDN pada tahun t (triliun rupiah)
 - DP_{rt} = Dana Pensiun pada tahun t (triliun rupiah)
 - $PDRB_{rt}$ = Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 (triliun rupiah)
 - α_0 = Koefisien regresi (konstanta)
 - $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = Parameter dari setiap variabel bebas
 - ϵ_{it} = *Error Term*

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran dari masing-masing parameter dalam model persamaan diatas. Nilai dari

parameter positif atau negative selanjutnya akan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Metode Data Panel

Data panel merupakan gabungan antara data lintas waktu (*time series*) dan data lintas individu (*cross section*), dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Analisis data panel digunakan untuk mengamati hubungan antara satu variabel terikat (*dependent variable*) dengan satu atau lebih variabel bebas (*Independent variable*).

Penggunaan data panel mampu memberikan banyak keunggulan secara statistik maupun secara teori ekonomi, antara lain (Gujarati, 2013) :

1. Teknik estimasi data panel dapat mengatasi heterogenitas dalam setiap unit secara eksplisit dengan memberikan variabel spesifik subjek.
2. Penggabungan observasi *time series* dan *cross section* memberikan lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinearitas antarvariabel, lebih banyak *degree of freedom* dan lebih efisien.
3. Dengan mempelajari observasi *cross section* berulang-ulang, data panel sangat cocok untuk mempelajari dinamika perubahan.
4. Data panel paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana tidak bisa dilihat pada data *time series* murni atau *cross section* murni.

Dalam regresi data panel terdapat empat model yang dapat digunakan. Model tersebut antara lain : model OLS *pooled*, model *fixed effect least square dummy variabel* (LSDV), model *fixed effect within-group* dan model *random*

effect. Pemilihan model yang akan dipakai, diseleksi dengan uji spesifikasi model. Terdapat dua uji spesifikasi yaitu efek tetap (*fixed effect*) atau efek random (*random effect*).

3.7.2 Estimasi Model Data Panel

Pada dasarnya ada tiga teknik untuk meregresi data panel yaitu : pendekatan OLS biasa (*Pooled Least Square*), pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*), dan pendekatan efek acak (*Random Effect Model*).

a. Pendekatan Kuadrat Terkecil (*Pooled Least Square*)

Merupakan teknik yang paling sederhana dengan mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada menunjukkan kondisi yang sesungguhnya, yaitu dengan menggabungkan seluruh data *time series* dan *cross section* dan kemudian mengestimasi model dengan menggunakan metode OLS. Hasil regresi ini dianggap berlaku pada semua objek pada semua waktu.

b. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Model ini dapat menunjukkan perbedaan konstanta antar objek, meskipun dengan koefisien regresi yang sama. Ini juga memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah *omitted variables* yang mungkin membawa perubahan pada *intercept time series* dan *cross section*. Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya digunakan *dummy variable*, oleh karena itu model ini dikenal juga dengan *Least Square Dummy Variables (LSDV)*. Didalam pemaparan estimasi efek tetap *unbalanced panel* (Wooldridge,2006) menjelaskan bahwa data yang hilang terkait dengan eror, dapat menghasilkan estimasi yang bersifat bias. Namun demikian, manfaat dari estimasi *fixed effect* adalah bahwa

attrition yang terkait dengan faktor yang luput dari pengamatan akan ditampung dalam P_i sehingga hasil estimasi masih dapat diandalkan (*unbiased*).

c. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect Model*)

Pendekatan *Random Effect Model* digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian. Tanpa menggunakan variabel semu, metode efek random menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek.

3.7.3 Uji Spesifikasi Model

a. Uji Spesifikasi Model dengan Uji Chow

Uji spesifikasi ini bertujuan untuk menentukan model analisis data panel yang digunakan. Uji Chow digunakan untuk memilih model *fixed effect* atau model *common effect* yang sebaiknya dipakai.

$$H_0 : \text{Common Effect}$$

$$H_a : \text{Fixed Effect}$$

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas *Chi-square* lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *common effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas *Chi-square* kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *fixed effect*. Ketika model yang terpilih adalah *fixed effect* maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu uji Hausmann untuk mengetahui apakah sebaiknya memakai *fixed effect (FEM)* atau *random effect model (REM)*.

b. Uji Spesifikasi Model dengan Uji Hausmann

Uji ini bertujuan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, yaitu *fixed effect model (FEM)* atau *random effect model (REM)*. Dalam FEM setiap obyek memiliki intersep yang berbeda-beda, akan tetapi intersep masing-masing obyek tidak berubah seiring waktu. Hal ini disebut dengan *time-invariant*. Sedangkan dalam REM, intersep (bersama) mewakili nilai rata-rata dari semua intersep (*cross section*) dan komponen ε_i mewakili deviasi (acak) dari intersep individual terhadap nilai rata-rata tersebut (Gujarati,2013). Hipotesis dalam uji Hausmann sebagai berikut :

$$H_0 \quad : \text{Random Effect Model}$$

$$H_a \quad : \text{Fixed Effect Model}$$

Statistic Uji Hausman ini mengikuti distribusi *statistic Chi Square* dengan *of freedom* sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka H_0 ditolak dan model yang tepat adalah model *Fixed Effect* sedangkan sebaliknya bila nilai statistic Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *Random Effect*.

3.8 Tahapan Analisis

3.8.1 Analisis Deskriptif perkembangan Dana Pensiun dan indikator Pembangunan Ekonomi Indonesia

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan

menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian.

Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia dan dana pensiun Indonesia.

3.8.2 Analisis Pengujian

3.8.2.1 Penaksiran

a. Korelasi (R)

Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya suatu hubungan linier antara variabel INV, DP dan PDRB terhadap INF. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi antara -1 sampai $+1$. Nilai r mendekati -1 atau $+1$ menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut nilai r yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda $+$ (positif) dan $-$ (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara variabel-variabel tersebut. Jika bernilai $+$ (positif) maka variabel-variabel tersebut memiliki hubungan yang searah, dalam arti lain peningkatan INV, DP dan PDRB akan bersamaan dengan peningkatan INF dan begitu juga sebaliknya. Jika bernilai $-$ (negatif) artinya korelasi antara ketiga variabel tersebut bersifat berlawanan. Penurunan nilai INV, DP dan PDRB akan bersamaan dengan penurunan INF.

b. Koefisien Determinasi (D)

Ukuran *Goodness of Fit* mencerminkan seberapa besar variasi dari *regressand* (Y) dapat diterangkan oleh *regressor* (X). Nilai dari *Goodness of Fit*

adalah antara 0 dan 1 ($0 \leq 1$). Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Nachrowi dan Usman, 2002).

Sedangkan menurut Gujarati (2003) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri adakalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (D) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, D menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau adjusted R^2 yang dirumuskan (Gujarati, 2003) :

$$Adjusted R^2 = 1 - R^2 - \left(\frac{-1}{n-k}\right) \dots \dots \dots (3.2)$$

- Dimana :
- D : Koefisien determinan
 - n : jumlah sampel
 - k : jumlah variabel independen

3.8.2.2 Pengujian

A. Uji Statistik t atau Uji Parsial

Uji t statistik dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh DP, BM, dan INV secara individual terhadap INF. Dalam hal ini pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Langkah-langkah pengujian :

1. Hipotesa :

Model I :

▼ INV

$H_0 : \alpha_1 = 0$ (INV berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Infrastruktur Jalan).

$H_a : \alpha_1 \neq 0$ (INV tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Infrastruktur Jalan).

▼ DP

$H_0 : \alpha_2 = 0$ (DP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Infrastruktur Jalan).

$H_0 : \alpha_2 \neq 0$ (DP tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Infrastruktur Jalan).

▼ PDRB

$H_0 : \alpha_3 = 0$ (PDRB berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap infrastruktur).

$H_0 : \alpha_3 \neq 0$ (PDRB tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap infrastruktur).

2. Uji Statistik t

Dengan cara menghitung nilai t dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{\alpha_i}{se \alpha_i} \dots\dots\dots(3.3)$$

dimana : α_i : Koefisien regresi

se : standar eror

dibandingkan dengan $t_{tabel} = \pm t (\alpha/2, n-1)$

3. Kriteria Uji

Terima H_0 jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < + t_{tabel}$, hal lain tolak H_0 .

Atau dalam olahan software, dikatakan signifikan jika nilai sig $< \alpha = 5\%$, 10%, dan 15%

4. Kesimpulan :

Sesuai kriteria uji maka terima H_0

B. Uji Statistik F atau Uji Simultan

Uji F dilakukan untuk mengetahui pada model apakah variabel INV, DP, dan PDRB secara keseluruhan signifikan secara statistic dalam mempengaruhi variabel INF.

Langkah-langkah pengujian :

1. Hipotesa :

• Model I

$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ (INV, DP dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap INF).

$H_a : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq 0$ (INV, DP dan PDRB secara bersama-sama tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap INF).

2. Uji Statistik F :

$$F = \frac{R^2/k-1}{(1-R^2)/(N-K)} \dots\dots\dots(3.4)$$

Dimana : K : jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N : jumlah observasi

3. Kriteria Uji :

Terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 .

Atau dalam olahan software, dikatakan signifikan jika nilai $sig < \alpha = 5\%$,
10% dan 15%.

4. Kesimpulan

Sesuai kriteria uji maka terima H_0 .

C. Uji Asumsi Klasik

Metode OLS mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimator OLS yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan kriteria ekonometrika, yaitu :

1. Tidak ada masalah hubungan antara variabel independen dan regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinearitas).
2. Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas), dan
3. Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokoreasi).

a. Multikolinearitas

Multikolinearitas berhubungan dengan situasi dimana ada hubungan linier baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen (Gujarati, 2003). Masalah multikolinearitas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk

menjelaskan dan memprediksi, multikolinieritas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak dipercaya.

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linier dalam model persamaan regresi yang digunakan. Apabila terjadi multikolinieritas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan uji *Variance Inflation Factor (VIF)*, dan nilai *tolerance*. Apabila nilai *tolerance* mendekati 1, serta nilai VIF disekitar angka 1 serta tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas dalam model regresi (Santoso, 2000).

b. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji F dapat menjadi tidak “*reliable*” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji White. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R^2 yang didapat digunakan untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai probability *Observation R-Squared*

lebih besar dari taraf nyata 5 persen. Maka hipotesis alternatif adanya heterokedasrisitas dalam model ditolak.

c. Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji Durbin Watson atau Durbin Watson Test. Dimana apabila di dan du adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai Durbin Watson berada pada $2 < DW < 4$ -du maka dapat dinyatakan tidak terdapat autokorelasi atau *no-autocorrelation* (Ariefianto, 2012).

d. Uji Hausmann

Uji ini bertujuan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, yaitu *fixed effect model (FEM)* atau *random effect model (REM)*. Dalam FEM setiap obyek memiliki intersep yang berbesa-beda, akan tetapi intersep masing-masing obyek tidak berubah seiring waktu. Hal ini disebut dengan *time-invariant*. Sedangkan dalam REM, intersep (bersama) mewakili nilai rata-rata dari semua intersep (*cross section*) dan komponen ε_i mewakili deviasi (acak) dari intersep individual terhadap nilai rata-rata tersebut (Gujarati,2013).

Hipotesis dalam uji Hausmann sebagai berikut :

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Statistic Uji Hausman ini mengikuti distribusi *statistic Chi Square* dengan *of freedom* sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka H_0 ditolak dan model yang tepat adalah model *Fixed Effect* sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *Random Effect*.

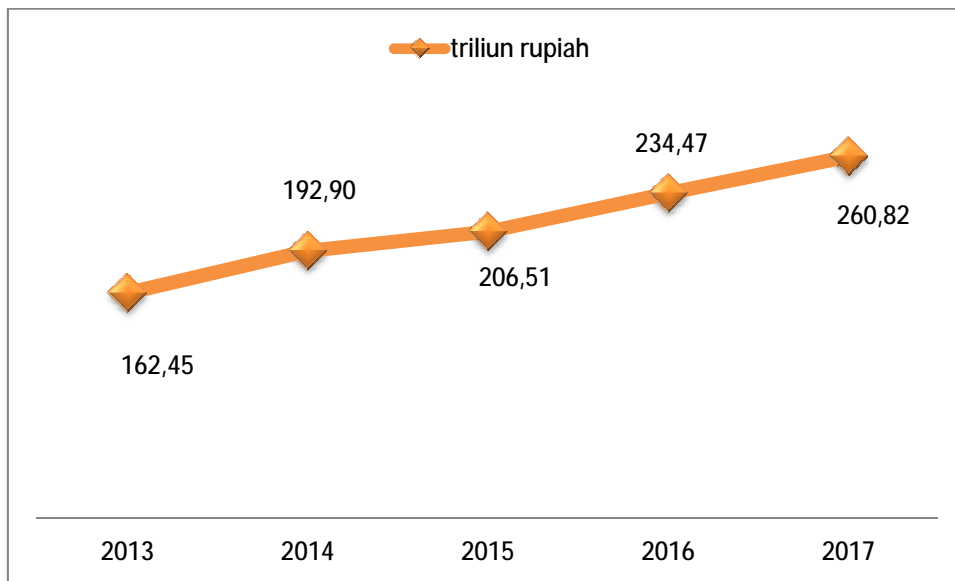
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskripsi Perkembangan Dana Pensiun

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dengan total penduduk sebanyak 257.912.349 pada tahun 2017, yang mana proporsi penduduk yang paling mendominasi berada pada rentang usia 10-50 tahun. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang berada pada usia muda dan produktif tersebut maka peningkatan pertumbuhan dana pensiun dimungkinkan untuk menjadi lebih meningkat lagi. Artinya peningkatan itu hanya akan terjadi jika pemerintah lebih gencar untuk mensosialisasikan program pensiun kepada masyarakat. Oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap dana pensiun, pada tahun 2017 OJK bekerja sama dengan asosiasi dan pelaku dana pensiun mengadakan “*Pensiun Day*”. Pada acara “*Pensiun Day*” diluncurkan logo dan Tagline “Yuk Siapkan Pensiun”, yang berarti sebuah ajakan kepada masyarakat untuk mulai mempersiapkan masa pensiun atau hari tua melalui program pensiun yang diikuti sejak masa bekerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun mengelola dana yang berasal dari pemberi kerja dan/peserta dan mengembangkan dana tersebut melalui investasi guna memastikan kesejahteraan peserta pada saat masa pensiun. Berikut adalah perkembangan aset bersih dana pensiun tahun 2013-2017:

Gambar 4.1
Perkembangan Aset Bersih Dana Pensiun



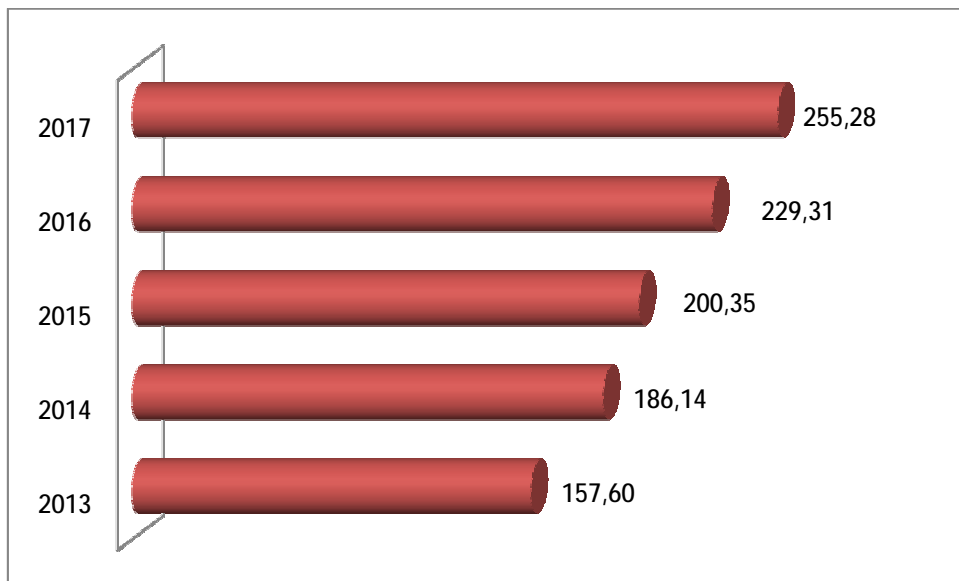
Sumber : OJK dan diolah (www.ojk.go.id)

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya jumlah aset dana pensiun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal itu tidak terlepas dari peningkatan jumlah peserta dana pensiun dimana menurut data OJK tahun 2013 peserta dana pensiun sebanyak 3.633.645 juta orang, tahun 2014 sebanyak 3.925.444 juta orang, tahun 2015 sebanyak 4.189.527 juta orang, tahun 2016 sebanyak 4.395.045 juta orang dan tahun 2017 sebanyak 4.455.712 juta orang. Peserta dana pensiun ini terdiri dari peserta aktif DPPK, peserta pasif DPPK, peserta aktif DPLK, dan peserta pasif DPLK.

Dana pensiun juga memiliki peran yang penting sebagai investor lokal yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur pemerintah. Dana pensiun menjadi salah satu pembeli utama dari Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah. Pada akhir 2017, investasi dana pensiun pada SBN sebesar Rp 58.142,98 Milyar atau 22,78% dari total investasinya. Berikut adalah data perkembangan investasi dana pensiun dari tahun 2013-2017:

Gambar 4.2

Pertumbuhan Investasi Dana Pensiun 2013-2017 (triliun rupiah)



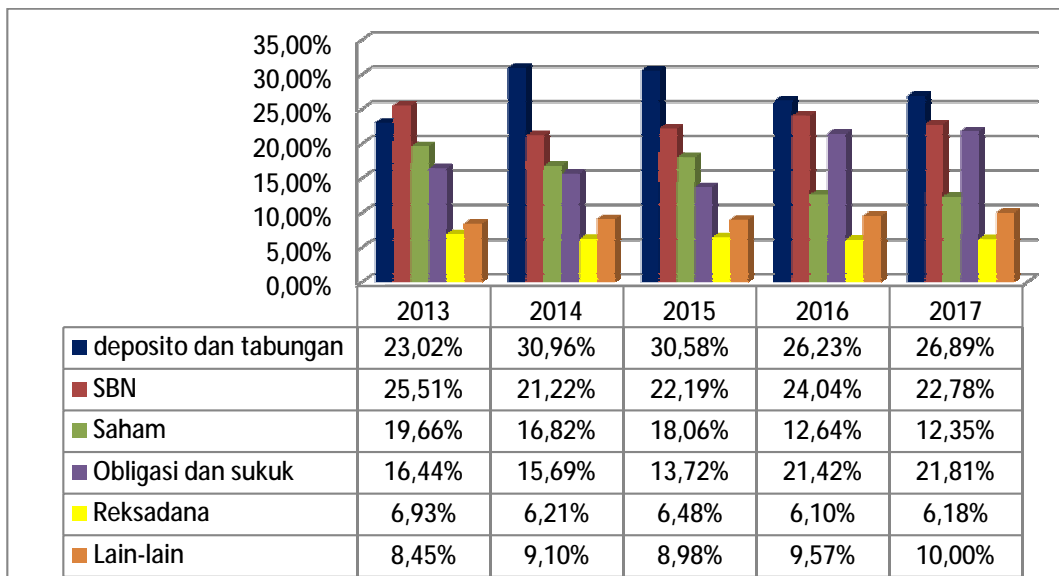
Sumber :OJK dan diolah (www.ojk.go.id)

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa perkembangan investasi dana pensiun selama kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan investasi yang berdasarkan program pensiun yang didominasi oleh peningkatan program pensiun DPPK-PPMP. Investasi merupakan komponen pokok didalam penyelenggaraan dana pensiun. Oleh sebab itu pengelolaannya haruslah dilakukan dengan penuh kehati-hatian sehingga hasil investasi itu nantinya dapat digunakan untuk kesejahteraan para peserta dana pensiun dihari tuanya.

Berdasarkan peraturan OJK nomor 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang investasi dana pensiun, terdapat 17 jenis investasi yang diperkenankan oleh regulator. Diantara 17 jenis investasi tersebut, terdapat 4 jenis investasi yang mendominasi portofolio investasi dana pensiun, yaitu deposito, surat berharga negara, obligasi dan saham.

Gambar 4.3

Perkembangan Portofolio Investasi Dana Pensiun Tahun 2013-2017



Sumber : OJK dan diolah (www.ojk.go.id)

Dari gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa proporsi portofolio investasi dana pensiun didominasi oleh deposito dan tabungan, SBN, Saham, dan obligasi dan sukuk. Jika dilihat persentase investasi masing-masing jenis portofolio ini selama lima tahun ini mengalami fluktuasi. Investasi dana pensiun pada portofolio menjadi dominan karena investasi pada sektor ini memiliki resiko yang lebih kecil jika dibandingkan dengan investasi pada sektor riil. Jika dilihat dari jenis- jenis investasi dana pensiun ini dapat diartikan bahwa dana pensiun telah berperan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam negeri bagi Indonesia. Contohnya pada jenis investasi di deposito dan tabungan yang mendominasi investasi portofolio dana pensiun, dimana dana dari deposito dan tabungan tersebut dapat dijadikan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oleh sebab itu untuk meningkatkan jumlah investasi dana pensiun tersebut maka peserta dana pensiun juga harus ditingkatkan.

4.2 Analisis Deskripsi Indikator Pembangunan Ekonomi Indonesia

Pembangunan diartikan sebagai proses dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa, dan lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolute (Todaro, 2010). Menurut Sadono Sukirno (2011), pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi sangat mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, apabila pembangunan ekonomi pada suatu negara tidak berjalan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka akan sangat berpengaruh terhadap jalannya pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut. Oleh sebab itu ada beberapa indikator yang dapat dijadikan untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi suatu negara. Berikut adalah perkembangan beberapa indikator pembangunan ekonomi Indonesia.

1) Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

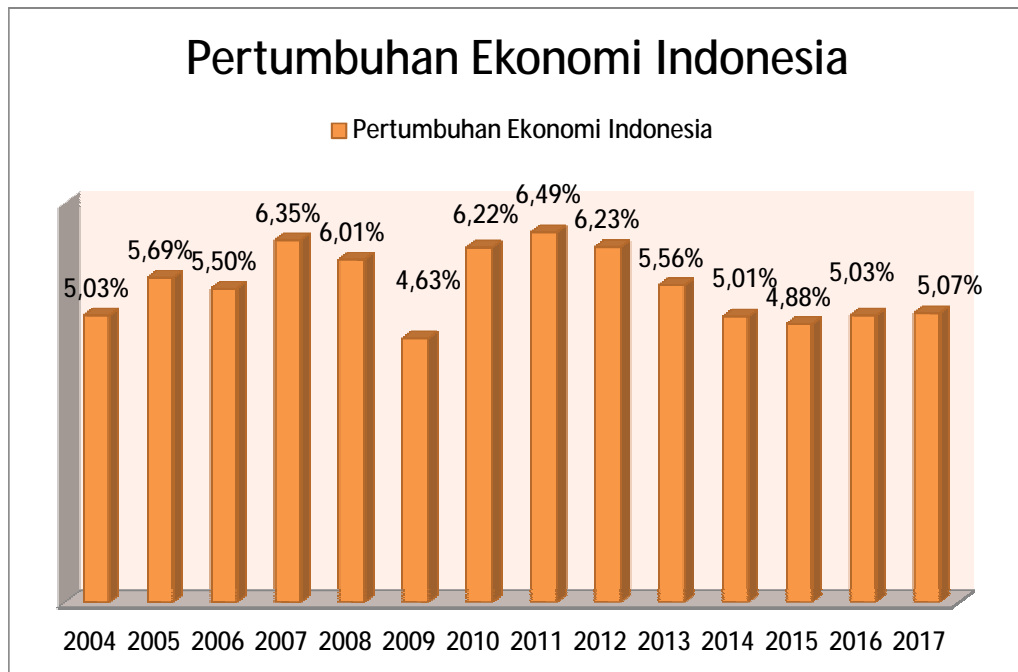
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator hasil pembangunan khususnya pembangunan ekonomi. Indikator agregat ekonomi makro yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam mendorong kesejahteraan rakyat. Jika kadar pertumbuhan ekonomi meningkat dari masa ke masa, ini bermakna bahwa pembangunan pada sektor ekonomi tumbuh pesat. Dengan kata

lain dapat dikatakan bahwa antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya satu dengan yang lainnya.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Todaro (2000) menjelaskan, sumber pertumbuhan ekonomi dapat meliputi berbagai faktor, namun faktor utama pertumbuhan ekonomi adalah investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya fisik, yang selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 4.4

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Sumber : BPS dan diolah (www.bps.go.id)

Kinerja perekonomian Indonesia yang digambarkan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti pada gambar grafik diatas selama 14 tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang paling

tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 6.49%. Pertumbuhan yang positif ini didukung oleh investasi, ekspor, dan konsumsi masyarakat, selain itu, dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, dan sektor pertambangan. Di sisi lain, nilai tukar rupiah yang terus mengalami penguatan (Kompas, 2011). Kemudian jika dilihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terendah adalah pada tahun 2009 yaitu 4,63 % hal ini disebabkan oleh krisis keuangan global yang berdampak pada perekonomian Indonesia, kemudian pertumbuhan impor yang tumbuh negatif 15 persen serta pertumbuhan ekspor yang juga masih minus 9,7 persen, meskipun pada bulan oktober 2009 sudah mulai tumbuh positif. Sektor konsumsi rumah tangga menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi (Kompas, 2009).

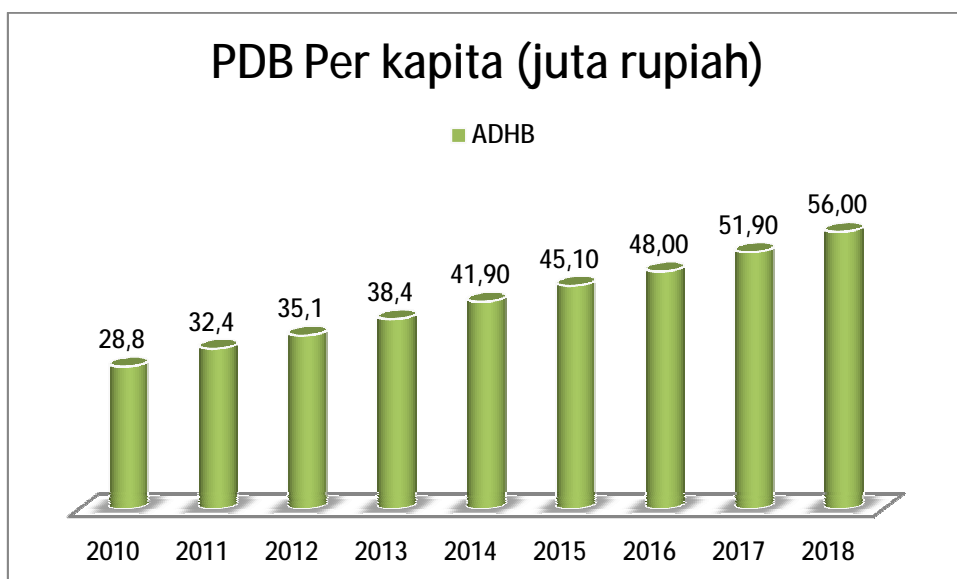
Konsumsi merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sekaligus juga indikator kesejahteraan penduduk Indonesia. Karena konsumsi rumah tangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional. Di kebanyakan negara, pengeluaran konsumsi sekitar 60-70 persen dari pendapatan nasional. Alasan yang kedua, konsumsi rumah tangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya. Sementara itu, dalam jangka panjang, pola konsumsi dan tabungan masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (Sukirno,2000).

2) Perkembangan PDB per Kapita

Didalam PDB terdapat beberapa hal yang tidak disertakan dalam perhitungannya seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi diluar pasar,

kualitas lingkungan dan distribusi pendapatan. Oleh sebab itu, PDB per kapita yang merupakan besarnya PDB dibagi dengan jumlah penduduk di suatu negara merupakan alat yang lebih baik yang dapat memberitahukan kita apa yang terjadi pada rata-rata penduduk, standar hidup dari warga negaranya (Mankiw,2006:23). Suatu negara yang memiliki PDB per kapita yang tinggi umumnya memiliki standar hidup yang juga tinggi. Perbedaan pendapatan mencerminkan perbedaan kualitas hidup. Negara kaya (dicerminkan oleh pendapatan per kapita yang tinggi) memiliki kualitas hidup yang lebih baik (dicerminkan oleh, antara lain ; angka harapan hidup, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan) dibandingkan dengan negara miskin. Selain itu, kenaikan dalam pendapatan per kapita merupakan pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat (Purba, 2011). Berikut ini adalah data perkembangan PDB per kapita Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 4.5
PDB Per kapita Indonesia Tahun 2010-2018



Sumber: BPS dan diolah (www.bps.go.id)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya PDB perkapita Indonesia mengalami kenaikan, hal ini didukung dengan terus meningkatnya PDB Indonesia dari tahun ke tahun. Kenaikan ini diharapkan akan berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas hidupnya. Sehingga dengan peningkatan PDB per kapita pembangunan sosial maupun ekonomi Indonesia dapat lebih cepat lagi.

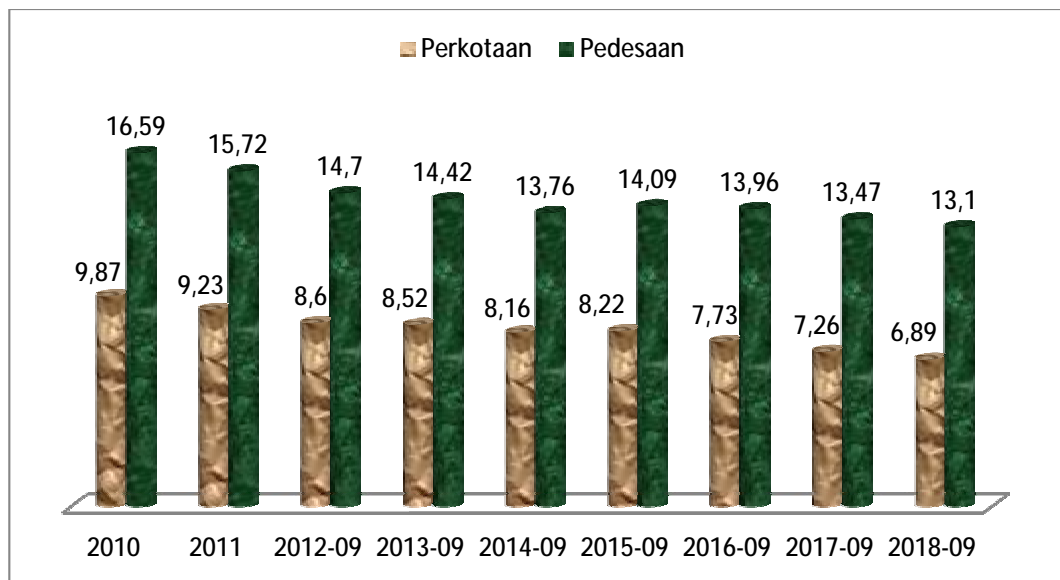
3) Kemiskinan di Indonesia

Persoalan kemiskinan menjadi salah satu target kebijakan pembangunan di setiap negara agar kesenjangan pendapatan menjadi semakin kecil. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulangnya masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi melibatkan juga preferensi, nilai dan politik. BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan ancaman tindak kekerasan. Barangkali generalisasi paling valid tentang orang-orang miskin adalah bahwa sebagian besar orang miskin hidup di daerah pedesaan, bahwa aktivitas utama mereka berada pada sektor pertanian dan aktivitas lain yang terkait, bahwa komposisinya cenderung lebih banyak kaum perempuan dan anak-anak ketimbang laki-laki

dewasa, dan bahwa pada umumnya orang-orang ini adalah kelompok etnis minoritas dan penduduk pribumi (Todaro, 2011:291).

Di Indonesia kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Sebagian besar orang miskin yang ada di Indonesia hidup di daerah pedesaan, yang aktivitas utama mereka rata-rata berada pada sektor pertanian dan aktivitas lain yang terkait. Hal ini dapat di lihat pada data di bawah ini:

Gambar 4.6
Persentase Penduduk Miskin Indonesia



Sumber : BPS dan diolah (www.bps.go.id)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penduduk miskin Indonesia terbesar berada pada pedesaan, yang pada grafik diatas dapat dilihat setiap tahunnya selalu mengalami penurunan. Banyaknya penduduk miskin di daerah pedesaan diantaranya disebabkan oleh kurangnya pendidikan yang memadai bagi penduduk desa, kurangnya modal dan akses bagi petani dalam memasarkan produk hasil pertaniannya, serta infrastruktur dipedesaan yang masih minim, dan lain-lain. Beberapa program yang telah di keluarkan pemerintah seperti dana

desa, rastra, program keluarga harapan dan lain sebagainya diharapkan akan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Sehingga terwujudlah masyarakat Indonesia dengan SDM yang berkualitas sebagai investasi untuk kemajuan Indonesia.

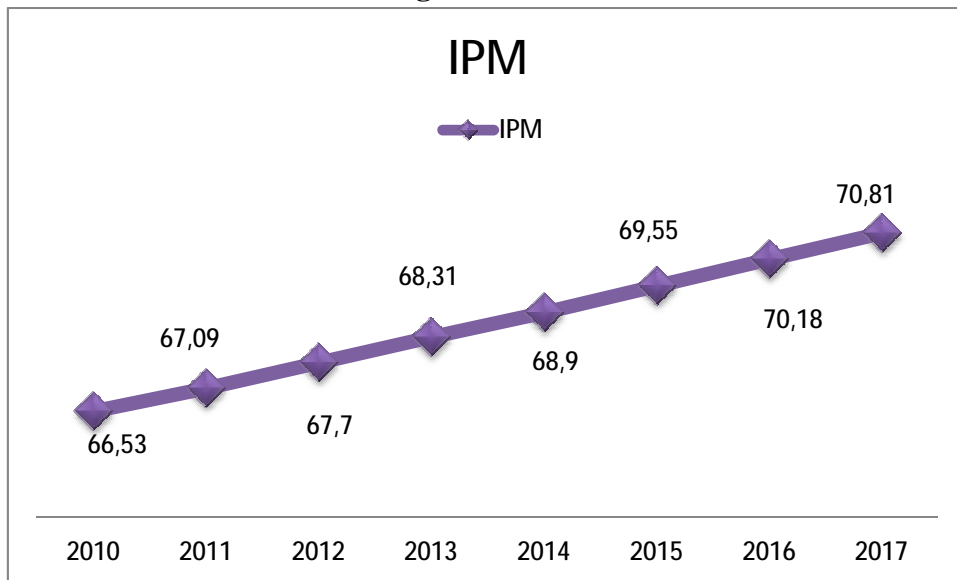
4) Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*)

Indikator yang paling luas untuk mengukur status kompratif pembangunan sosio-ekonomi disajikan dalam laporan-laporan tahunan UNDP berjudul *Human Development Index* (Laporan Pembangunan Manusia). Inti dari semua laporan ini, yang dimulai tahun 1990, adalah pembuatan dan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia. IPM berusaha memeringkat semua negara dengan skala 0 (pembangunan manusia terendah) sampai 1 (pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan tiga tujuan atau produk akhir pembangunan, yaitu masa hidup (*longevity*) yang diukur melalui harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak (Todaro, 2011:57).

Salah satu manfaat utama IPM adalah untuk menunjukkan bahwa suatu negara sesungguhnya dapat berkinerja jauh lebih baik sekalipun tingkat pendapatannya rendah. IPM mengingatkan bahwa pembangunan yang sesungguhnya berarti pembangunan manusia dalam arti luas, bukan sekedar pendapatan yang lebih tinggi. Kesehatan dan pendidikan adalah input bagi fungsi produksi nasional dalam perannya sebagai komponen modal manusia, yang berarti investasi produktif dalam sumber daya manusia. Peningkatan kesehatan dan pendidikan merupakan tujuan tersendiri yang penting dari upaya pembangunan. IPM memiliki kecenderungan kuat meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, karena negara-negara yang lebih kaya dapat

berinvestasi lebih banyak dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang berarti tambahan modal manusia ini mempertinggi produktivitas. Berikut ini adalah data yang menunjukkan tingkat IPM Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:

Gambar 4.7
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia



Sumber :BPS dan diolah (www.bps.go.id)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan IPM dari tahu 2010 sampai 2017 mengalami kenaikan, dimana peningkatan IPM seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Berdasarkan data *Human Development Report* UNDP bahwasanya Indonesia masuk kedalam *Medium Human Development* dengan ranking ke 113 dengan nilai IPM 0.689 pada tahun 2015 dari seluruh negara-negara didunia. Di kawasan ASEAN IPM Indonesia menurut data BPS tahu 2010-2015 masih kalah dengan Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Kamboja. Sehingga Indonesia perlu lebih meningkatkan pembangunan sosial maupun ekonomi agar tidak tertinggal dengan negara-negara maju dan berkembang lainnya.

4.3 Deskripsi Data

4.3.1 Perkembangan Infrastruktur di Indonesia

Pergerakan ekonomi seringkali dikaitkan dengan tinggi atau rendahnya aktivitas ekonomi pada suatu negara, tidak terkecuali pada Indonesia. Sebagai salah satu bagian dari negara di dunia, Indonesia masih jatuh tertinggal dibandingkan negara-negara lain terutama di antara negara berkembang secara khususnya jika dikaitkan dengan ketersediaan infrastruktur. Dalam *Global Competitiveness Report 2015-2016*, yang disusun oleh lembaga *World Economic Forum (WEF)*, Indonesia menempati urutan ke 62 dari 140 negara dalam hal pembangunan infrastruktur, peringkat yang bertahan di standar rata-rata. Ketika keadaan infrastruktur di sebuah negeri lemah, itu berarti bahwa perekonomian negara itu berjalan dengan cara yang sangat tidak efisien.

Biaya logistic yang tinggi, berujung pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya saing karena biaya yang tinggi, belum lagi dengan munculnya ketidakadilan sosial. Misalnya, sulit bagi sebagian penduduk untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan, atau susahya anak-anak pergi ke sekolah karena perjalanannya terlalu susah. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro seharusnya memiliki hubungan timbale balik, karena pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek *multiplier*. Sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada, untuk menyerap semakin besarnya aliran barang dan orang yang beredar atau bersirkulasi di seluruh perekonomian.

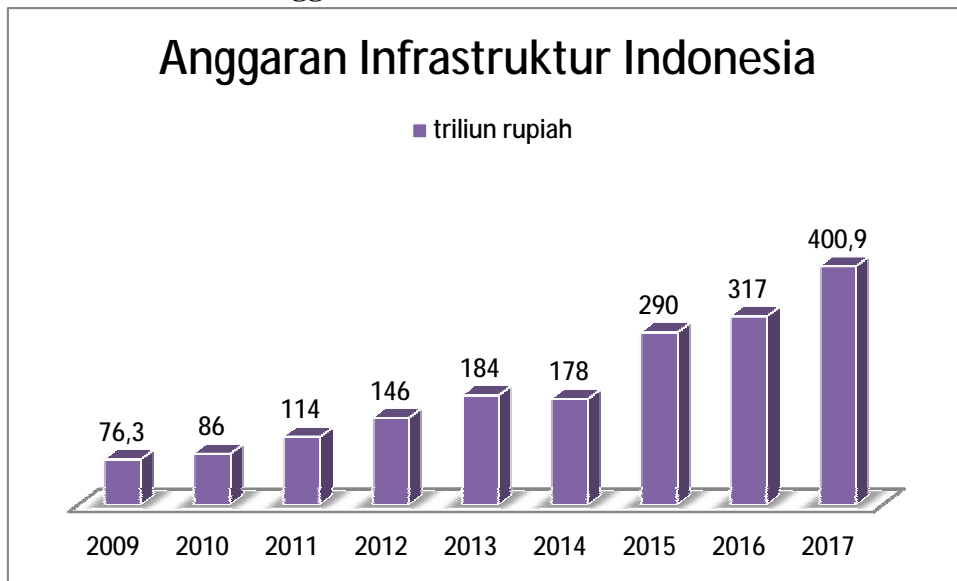
Namun, kalau infrastrukturnya tidak dapat menyerap peningkatan kegiatan ekonomi dan tidak cukup banyak infrastruktur baru yang dikembangkan

maka akan terjadi masalah. Misalnya, buah yang diproduksi dalam negeri bisa saja lebih mahal dibandingkan dengan buah yang diimpor dari luar negeri. Selanjutnya, biaya logistic yang tinggi di Indonesia bisa menyebabkan perbedaan harga yang substansial di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Misalnya, beras atau semen jauh lebih mahal di Indonesia bagian timur daripada di pulau Jawa dan Sumatera karena biaya tambahan yang timbul dari titik produksi ke pengguna akhir.

Infrastruktur yang kurang memadai juga mempengaruhi daya tarik iklim investasi di Indonesia. Investor asing penuh kekhawatiran untuk berinvestasi misalnya karena fasilitas manufaktur di Indonesia seperti pasokan listrik tidak pasti atau biaya transportasi sangat tinggi. Menurut data yang diterbitkan oleh Kamar Dagang Indonesia dan Industri (Kadin Indonesia), dari total pengeluaran perusahaan di Indonesia, sekitar 17 persen diserap oleh biaya logistic. Hal-hal demikian jelas akan membuat para investor berfikir dua kali sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sadar akan pentingnya untuk memperbaiki keadaan infrastruktur sehingga iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik. Namun pengembangan infrastruktur Indonesia baik infrastruktur keras maupun lunak bukanlah tugas yang mudah. Oleh sebab itu dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah membuat terobosan dengan meningkatkan anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang cukup tinggi tiap tahunnya. Yang mana pemerintah memotong anggaran-anggaran yang tidak produktif seperti memotong subsidi energy. Berikut ini adalah data alokasi belanja pemerintah untuk infrastruktur :

Gambar 4.8
Anggaran Infrastruktur Indonesia



Sumber:kemenkeu dan diolah (www.kemenkeu.go.id)

Dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan anggaran yang cukup signifikan dalam upaya untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur. Hal ini juga dikarenakan tingginya tuntutan bahwa negara harus mampu menjalankan perannya dalam menyediakan pelayanan publik terutama penyediaan jalan, yang mengakibatkan negara harus mempersiapkan dana yang tidak sedikit. Ketika pemerintah dapat menjadi fasilitator penyediaan pelayanan publik yang akhirnya akan mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sistem infrastruktur saling berhubungan satu sama lain, sistem transportasi merupakan suatu alat untuk memastikan pengiriman barang dan jasa sebagai salah satu indikator untuk suatu kemakmuran ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, serta berkontribusi terhadap kualitas hidup.

4.3.2 Perkembangan Investasi di Indonesia

Menurut Undang-Undang RI No. 25 tahun 2007, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah

negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Berikut ini adalah data realisasi investasi PMDN Indonesia :

Tabel 4.1
Realisasi Investasi PMDN Indonesia

Negara	Tahun	Realisasi Investasi (Milliar rupiah)	Realisasi Proyek
INDONESIA	2008	20,363.40	239
	2009	37,799.90	248
	2010	60,626.30	875
	2011	76,000.70	1,313
	2012	92,182.00	1,210
	2013	128,150.60	2,129
	2014	156,126.30	1,652
	2015	179,465.90	5,100
	2016	216,230.80	7,511
	2017	262,351.00	8,838

Sumber : BPS dan diolah (www.bps.go.id)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Investasi PMDN setiap tahunnya mengalami kenaikan, akan tetapi jumlah proyek yang dikerjakan mengalami fluktuasi sejak tahun 2011-2017. Investasi terbesar PMDN berada pada sektor perindustrian yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Bergitu juga dengan jumlah proyek yang dikerjakan, sektor perindustrian adalah sektor yang terbanyak.

4.4.3 Perkembangan PDB Indonesia

Menurut Mankiw (2006) dalam analisis makro pengukuran dalam perekonomian suatu negara di ukur dari produk domestic bruto (PDB) suatu negara. PDB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses

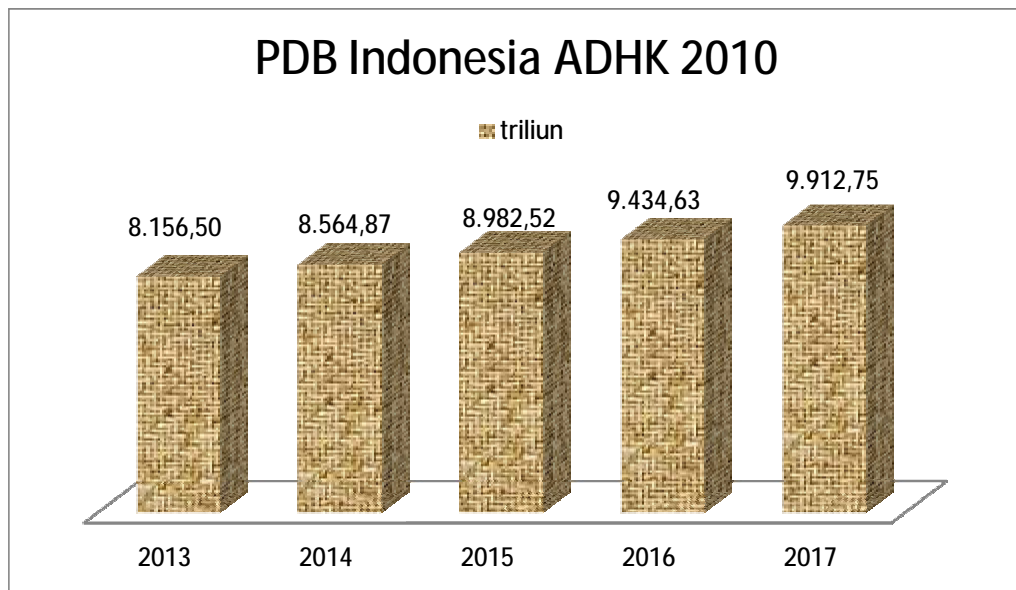
peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan (PDB riil) sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan merupakan pertumbuhan riil yang terjadi karena adanya tambahan produksi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan PDB yang menjadi penggerak bagi pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDB. Diantara faktor tersebut adalah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan net ekspor. Adanya keseimbangan dalam kondisi perekonomian suatu negara melibatkan berbagai variabel ekonomi yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor yang merupakan variabel inti dalam mencapai keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Konsumsi merupakan komponen yang sangat penting dalam perbelanjaan *aggregate*.

Keberhasilan pertumbuhan tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi merupakan kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi meningkatnya pendapatan masyarakat. Faktor yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu dan bagaimana proporsinya terhadap pendapatan nasional. Berikut ini adalah grafik yang menggambarkan pertumbuhan PDB Indonesia dalam 5 tahun terakhir:

Gambar 4.9

Pertumbuhan PDB Indonesia menurut Lapangan Usaha ADHK 2010



Sumber : BPS dan diolah (www.bps.go.id)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa PDB Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini tidak terlepas dari peningkatan investasi dalam rangka untuk meningkatkan produktifitas Indonesia baik dalam bentuk barang maupun jasa. Adapun sektor lapangan usaha yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap peningkatan produk domestic bruto Indonesia yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta pertanian, kehutanan dan perikanan. Ketiga sektor ini menurut data BPS pada tahun 2013 sampai 2017 memberikan kontribusi diatas seribu triliun setiap tahunnya terhadap pembentukan total produk domestic bruto Indonesia.

4.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

4.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk melihat frekuensi data independen dan dependen variabel data, serta sebaran data pada tingkat maksimum dan minimum dari data. Adapun hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

	INF	INV	DP	PDRB
Mean	1404.733	1.46E+13	2.15E+13	6.42E+14
Median	1482.500	9.12E+12	1.37E+12	3.65E+14
Maximum	2298.000	4.73E+13	2.07E+14	1.64E+15
Minimum	50.00000	3.48E+11	1.72E+10	8.93E+13
Std. Dev.	676.2348	1.49E+13	5.47E+13	5.57E+14
Skewness	-0.623821	1.077164	2.683926	0.560481
Kurtosis	2.428888	2.846748	8.495634	1.650162
Jarque-Bera	2.353477	5.830773	73.76979	3.848273
Probability	0.308283	0.054183	0.000000	0.146002
Sum	42142.00	4.38E+14	6.45E+14	1.93E+16
Sum Sq. Dev.	13261510	6.40E+27	8.67E+28	8.99E+30
Observations	30	30	30	30

Sumber: E-Views 8 dan diolah

Dari hasil statistik deskriptif diatas, menunjukkan bahwasanya dalam rentang tahun 2015-2017, nilai mean dari INF 10 Provinsi di Indonesia sebesar 1404.7 artinya bahwa dalam kurun waktu 3 tahun infrastruktur jalan nasional mengalami kenaikan sebesar 1404.7 km. Sementara nilai mean dari variabel INV (Investasi) sebesar 1.46 ini berarti bahwa dalam kurun waktu 3 tahun investasi penanaman modal dalam negeri di 10 provinsi di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 1.46 triliun rupiah. Sementara itu nilai mean dari variabel DP (dana pensiun) sebesar 2.15 artinya dalam kurun waktu 3 tahun dana pensiun di 10 provinsi di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2.15 Triliun rupiah. Dan nilai mean dari variabel PDRB sebesar 6.42 artinya dalam kurun waktu 3 tahun PDRB di 10 provinsi di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 6.42 Triliun rupiah.

4.4.2 Hasil Analisis Regresi

Tabel 4.3
Regresi Berganda Model INF

Dependent Variable: INF				
Method: Panel Least Squares				
Date: 02/28/19 Time: 12:34				
Sample: 2015 2017				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INV	1.33E-11	1.06E-11	1.257247	0.2198
DP	-1.09E-11	2.04E-12	-5.359350	0.0000
PDRB	2.65E-13	3.36E-13	0.788040	0.4378
C	1275.015	128.1642	9.948292	0.0000
R-squared	0.619943	Mean dependent var	1404.733	
Adjusted R-squared	0.576090	S.D. dependent var	676.2348	
S.E. of regression	440.2854	Akaike info criterion	15.13629	
Sum squared resid	5040131.	Schwarz criterion	15.32312	
Log likelihood	-223.0443	Hannan-Quinn criter.	15.19606	
F-statistic	14.13692	Durbin-Watson stat	0.119764	
Prob(F-statistic)	0.000012			

Sumber: E-Views 9 dan diolah

Dari hasil regresi pertama diatas, ditemukan masalah autokorelasi dan variabel bebas seperti INV dan PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Sehingga diduga dengan perlu dilakukannya logaritma natural dalam model ini. Transformasi logaritma natural biasanya digunakan pada situasi dimana terdapat hubungan tidak linier antara variabel penjelas (independen) dengan variabel terikat (dependent). Transformasi logaritma akan membuat hubungan yang tidak linier dapat digunakan dalam model linier. Berikut adalah Logaritma natural pada model ini ;

Tabel 4.4
Logaritma Natural Model INF

Dependent Variable: LOG(INF)				
Method: Panel Least Squares				
Date: 02/28/19 Time: 12:37				
Sample: 2015 2017				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(INV)	0.254660	0.149209	1.706732	0.0998
LOG(DP)	-0.583143	0.113459	-5.139701	0.0000
LOG(PDRB)	0.536137	0.290160	1.847728	0.0760
C	-2.132165	5.793005	-0.368059	0.7158
R-squared	0.566172	Mean dependent var	6.946931	
Adjusted R-squared	0.516115	S.D. dependent var	1.086052	
S.E. of regression	0.755477	Akaike info criterion	2.400632	
Sum squared resid	14.83940	Schwarz criterion	2.587459	
Log likelihood	-32.00948	Hannan-Quinn criter.	2.460400	
F-statistic	11.31055	Durbin-Watson stat	0.729194	
Prob(F-statistic)	0.000062			

Sumber: E-Views 9 dan diolah

Dari hasil uji logaritma natural diatas dapat dilihat bahwasanya semua variabel bebas pada model ini signifikan pada derajat α 5% dan α 10%. Akan tetapi masih ditemukan masalah autokorelasi. Sehingga diduga adanya mekanisme cobweb (*lagged response*) maka prosedur koreksi yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan term lag variabel terikat (INF_{t-1}) pada model regresi awal. Untuk menentukan nilai (INF_{t-1}) maka dilakukan uji *autoregressive* sebagai berikut :

Tabel 4.5

Autoregressive Model of INF

Dependent Variable: INF				
Method: Panel Least Squares				
Date: 02/28/19 Time: 12:39				
Sample (adjusted): 2016 2017				
Periods included: 2				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 20				
Convergence achieved after 3 iterations				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-136.8750	3051.891	-0.044849	0.9647
AR(1)	0.983218	0.030321	32.42670	0.0000
R-squared	0.983170	Mean dependent var	1389.350	
Adjusted R-squared	0.982235	S.D. dependent var	677.5743	
S.E. of regression	90.31195	Akaike info criterion	11.93906	
Sum squared resid	146812.5	Schwarz criterion	12.03863	
Log likelihood	-117.3906	Hannan-Quinn criter.	11.95849	
F-statistic	1051.491	Durbin-Watson stat	2.449480	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Inverted AR Roots	.98			

Sumber: E-Views 9 dan diolah

Dari hasil *autoregressive*, maka didapat hasil bahwasanya variabel terikat pada tahun sebelumnya (INF_{t-1}) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel terikat pada tahun t (INF_{t-1}). Sehingga didalam model akan ditambahkan lag variabel terikat atau variabel terikat pada tahun sebelumnya sebagai variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

4.4.3 Penaksiran

1) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*R Square*) berarti proporsi persentase variabel total dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) yang dijelaskan oleh variabel bebas (independen) secara bersama-sama. Berdasarkan dari model estimasi pertama yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi INF 10 Provinsi di Indonesia setelah dilakukan *autoregressive* dapat dilihat bahwa nilai R^2 adalah

sebesar 98.31%, artinya secara bersama-sama variabel INV, DP, PDRB dan INF_{t-1} memberikan variasi penjelasan terhadap infrastruktur, sedangkan nilai 1.69% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk kedalam model estimasi atau berada pada *disturbance error term*.

2) Korelasi (R)

Dari hasil regres pada model pertama dan model *autoregressive* untuk model pertama (variabel-variabel yang mempengaruhi INF 10 provinsi di Indonesia) diperoleh nilai R sebesar 0.9910776962 atau 99,10%, artinya variabel bebas INV, DP, PDRB dan INF_{t-1} (INF tahun sebelumnya) dapat menjelaskan variabel terikat (INF) secara signifikan.

Suatu variabel bebas dikatakan memiliki kekuatan hubungan yang positif terhadap variabel terikat apabila memiliki nilai koefisien bertanda positif dan bernilai diatas 0.05 ($\alpha = 5\%$) dan dikatakan signifikan apabila nilai *probability* dari variabel bebas tersebut lebih kecil dari α 5%, 10% dan 15%.

4.4.4 Uji Statistik

1) Pengujian Signifikansi Simultan (Uji-F)

Uji-f statistic bertujuan untuk pengujian signifikan semua variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel dependen. Dari hasil regresi dengan menggunakan *autoregressive* pada model pertama, variabel INV (Investasi), DP (dana pensiun), PDRB (produk domestic regional bruto), dan INF_{t-1} (INF tahun sebelumnya) terhadap pembangunan Infrastruktur jalan di 10 Provinsi di Indonesia, maka nilai F_{tabel} sebesar 0.000062 (dibawah α 1%), sedangkan nilai F_{hitung} adalah sebesar 11.31. Hal ini menunjukkan bahwa variable

independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)

Uji-t statistic dilakukan bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual menjelaskan variasi variabel dependen. Regresi pengaruh variabel INV, DP, PDRB dan INF_{t-1} pada model pertama dengan uji *autoregressive* terhadap pembangunan Infrastruktur jalan nasional di 10 provinsi di Indonesia. Adapun dalam penelitian ini untuk melihat nilai t_{tabel} yaitu:

Model pertama : $df (n)-k = 30 - 5 = 25$, $\alpha = 5\%$ maka nilai t_{tabel} sebesar 1.708

4.4.5 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan terdapat adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Syarat model regresi yang baik adalah seharusnya terbebas dari multikolinearitas. Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan uji VIF. Jika nilai VIF disekitar angka 1 serta tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas atau sebaliknya. Berikut adalah hasil uji VIF model INF :

Tabel 4.6
Uji Multikolinearitas dengan Uji VIF

Variance Inflation Factors			
Date: 02/28/19 Time: 13:08			
Sample: 1 30			
Included observations: 30			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
INV	1.12E-22	7.423095	3.711349
DP	4.17E-24	2.164332	1.866075
PDRB	1.13E-25	12.47281	5.246366
C	16426.07	2.542064	NA

Uji multikolinearitas dengan menggunakan uji VIF diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF pada salah satu variabel tidak melebihi angka 10. Hal itu dapat dilihat pada *centered* VIF nya. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model diatas.

2) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut terjadi heterokedastisitas dan jika berbeda disebut tidak terjadi heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari heterokedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya heterokedastisitas, dapat dilakukan dengan melihat dasar analisis heterokedastisitas sebagai berikut :

antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Dasar analisis heterokedastisitas sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Heterokedastisitas dengan Uji White

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1.735372	Prob. F(9,20)	0.1459
Obs*R-squared	13.15475	Prob. Chi-Square(9)	0.1557
Scaled explained SS	7.645708	Prob. Chi-Square(9)	0.5702

Sumber : E-Views 9 dan diolah

Karena uji heterokedastisitas dengan uji *White* di atas menghasilkan nilai *Prob.Chi-Square(6)* pada *Obs*R-squared* sebesar 0.1557 lebih dari 5 persen (0.05) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model diatas.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji apakah suatu model terdapat autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji statistic *Durbin Watson* yaitu dengan cara melihat nilai (D-W) yang diperoleh.

Pada model diatas setelah dilakukan uji *autoregressive* diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 2.449480 artinya pada model yang digunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi. Dimana standar suatu model dikatakan tidak terdapat autokorelasi apabila nilai D-W yang diperoleh $1,54 < D-W < 2,46$.

4) Uji Hausman

Tabel 4.8
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.058321	3	0.0448

Sumber: E-Views 9 dan diolah

Dari data diatas, maka didapat nilai *cross section random* sebesar 0.0448. Nilai *probability* < 0.05 , maka model yang dipilih adalah *random effect*. Dapat disimpulkan bahwa *random effect* lebih tepat dibandingkan model *fixed effect*. Artinya setiap provinsi berkontribusi baik itu dalam bentuk investasi maupun peningkatam pertumbuhan ekonomi maka akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ataupun peningkatan pembangunan infrastruktur di setiap provinsi.

4.4.6 Interpretasi Hasil

Dari data hasil logaritma natural yang telah diperoleh maka persamaan regresi berikut dan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan hasil *autoregressive* model pertama sebagai berikut:

$$\text{INF}_{t} = -2.132165 + 0.254660 \text{ INV}_{t} - 0.583143 \text{ DP}_{t} + 0.536137 \text{ PDRB}_{t} + 0.983218 \text{ INF}_{t-1}$$

Dari hasil estimasi yang diperoleh dapat dibuat sebuah interpretasi model atau hipotesa yang diambil melalui regresi ini, yaitu:

- a. Bahwa variabel INV (investasi dalam bentuk PMDN) mempunyai pengaruh positif terhadap infrastruktur jalan nasional, sebab nilai koefisien variabel INV yaitu 0.254660. Artinya, apabila nilai INV (Triliun rupiah) dinaikkan 1 triliun, maka akan meningkatkan pembangunan Infrastruktur jalan nasional di 10 provinsi di Indonesia sebesar 0.254660% (*ceteris paribus*).
- b. Bahwa variabel DP (dana pensiun) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap Infrastruktur jalan nasional, sebab nilai koefisien variabel DP bernilai negative yaitu -0.583143. Artinya apabila nilai DP (Triliun rupiah) dinaikkan sebesar 1 triiun, maka akan menyebabkan penurunan pembangunan infrastruktur jalan nasional di 10 provinsi sebesar 0.583143% (*ceteris paribus*). Hal ini terjadi karena saat ini dana pensiun belum digunakan menjadi sumber dana secara langsung bagi pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain dana pensiun belum melirik infrastruktur sebagai salah satu tempat untuk melakukan investasi, karena melihat dari data investasi dana pensiun masih dominan pada SBN, deposito, saham, dan jenis investasi portofolio lainnya.

- c. Bahwa variabel PDRB (produk domestik regional bruto) mempunyai pengaruh positif terhadap infrastruktur jalan nasional, sebab nilai koefisien variabel PDRB yaitu 0.536137. Artinya, apabila nilai PDRB (Triliun rupiah) dinaikkan 1 triliun, maka akan meningkatkan pembangunan Infrastruktur jalan nasional di 10 provinsi di Indonesia sebesar 0.536137% (*ceteris paribus*).
- d. Bahwa variabel INF_{t-1} (INF pada tahun sebelumnya) mempunyai pengaruh positif terhadap infrastruktur jalan nasional, sebab nilai koefisien variabel INF_{t-1} yaitu 0.983218. Artinya, apabila nilai INF_{t-1} (persen) dinaikkan 1%, maka akan meningkatkan pembangunan Infrastruktur jalan nasional di 10 provinsi di Indonesia sebesar 0.983218% (*ceteris paribus*).

4.4.7 Konstanta dan Intersep

Didalam hasil estimasi data dalam model regresi variabel-variabel yang mempengaruhi INF 10 provinsi di Indonesia, terdapat nilai konstanta sebesar -2,132165 yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat nilai rata-rata INF 10 provinsi di Indonesia berkecenderungan turun ketika variabel penjelas tetap. Penyebab terjadinya penurunan pada infrastruktur jalan jika variabel bebasnya tetap dikarenakan jalan merupakan salah satu barang publik yang setiap saat digunakan oleh masyarakat, artinya kemungkinan untuk terjadinya kerusakan pada jalan sangat besar ditambah lagi Indonesia yang memiliki letak geografis yang rawan akan bencana seperti gempa bumi, banjir, longsor dan tsunami. Jika variabel-variabel bebas tidak meningkat atau tetap setiap tahunnya maka kemampuan pemerintah untuk terus membangun infrastruktur jalan akan terkendala sehingga perbaikan jalan nasional akan

terkendala yang akan berakibat pada berkurangnya jalan nasional yang memiliki kualitas baik dan sedang. Untuk interpretasi hasil regresi variabel independen, akan dijelaskan sebagai berikut:

1) **Investasi (INV)**

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel INV adalah 0.254660 dimana variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Infrastruktur jalan nasional 10 provinsi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} = 1.71$ dan nilai *probability* sebesar 0.0998 (dibawah α 10%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan INV dengan Infrastruktur jalan nasional di 10 provinsi di Indonesia adalah positif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai INV naik sebesar 1 triliun rupiah maka Infrastruktur Jalan akan meningkat sebesar 0.254660 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Oleh karena itu, variabel INV terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Infrastruktur Jalan nasional maka hipotesis di terima.

2) **Dana Pensiun (DP)**

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel DP adalah -0.583143 dimana variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Infrastruktur jalan nasional di 10 provinsi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} = -5.14$ dan nilai *probability* sebesar 0.0000 (dibawah α 1%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan DP dengan Infrastruktur Jalan nasional di 10 provinsi di Indonesia adalah negatif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai DP naik sebesar 1 triliun rupiah maka Infrastruktur Jalan nasional akan mengalami penurunan sebesar 0.583143 persen dengan asumsi *ceteris paribus*.

Oleh karena itu, variabel DP terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Infrastruktur jalan nasional maka hipotesis di tolak.

3) **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel PDRB adalah 0.536137 dimana variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Infrastruktur Jalan nasional 10 provinsi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} = 1.85$ dan nilai *probability* sebesar 0.0760 (dibawah α 10%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan PDRB dengan Infrastruktur jalan nasional di 10 provinsi di Indonesia adalah positif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai PDRB naik sebesar 1 triliun rupiah maka Infrastruktur Jalan akan meningkat sebesar 0.881326 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Oleh karena itu, variabel PDRB terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Infrastruktur Jalan maka hipotesis di terima.

4) **INF_{t-1}**

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel INF_{t-1} adalah 0.983218 dimana variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Infrastruktur Jalan nasional 10 provinsi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} = 32.43$ dan nilai *probability* sebesar 0.0000 (dibawah α 1%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan INF_{t-1} dengan pembangunan Infrastruktur Jalan 10 provinsi di Indonesia adalah positif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika nilai INF_{t-1} naik sebesar 1 triliun rupiah maka Infrastruktur Jalan akan meningkat sebesar 0.983218 persen dengan asumsi *ceteris paribus*. Oleh karena itu, variabel INV terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Infrastruktur Jalan maka hipotesis di terima.

4.5 Pembahasan Hasil Regresi Linier Berganda

Dari hasil penelitian diatas setelah dilakukan estimasi pada model dapat dilihat bahwa variabel-variabel dependen yaitu :

1. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Infrastruktur jalan nasional artinya variabel investasi memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kontribusi investasi terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat penting dikarenakan Indonesia masih kekurangan modal dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. APBN kita tidak mampu untuk membiayai seluruh pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan pemerintah dalam RPJMN yakni sebesar 4700 triliun. Oleh sebab itu pemerintah terus mendorong dan meningkatkan investasi dari luar negeri maupun dalam negeri untuk mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pemerintah saat ini menawarkan dua skema dalam pembiayaan infrastruktur. Skema pertama adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan skema kedua adalah pembiayaan infrastruktur nonanggaran pemerintah (PINA) yang menjadi alternative pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur publik di Indonesia. Serta melakukan evaluasi terhadap regulasi-regulasi yang selama ini memperlambat atau bahkan menghambat investasi. Oleh sebab itu investasi menjadi salah satu variabel yang berpengaruh infrastruktur.
2. Dana Pensiun berpengaruh negative dan signifikan terhadap infrastruktur jalan nasional artinya variabel dana pensiun belum berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Karena sampai saat ini dana pensiun belum digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu alternative pembiayaan

infrastruktur. Oleh sebab itu hasil estimasi variabel dana pensiun bertanda negative. Akan tetapi pemerintah telah mewacanakan untuk menggunakan dana pensiun sebagai modal pembiayaan pembangunan infrastruktur, hal ini dikarenakan dana dari pajak maupun utang sangat terbatas. Potensi dana pensiun untuk pembiayaan infrastruktur sangatlah besar, jika dilihat data OJK tahun 2017 jumlah peserta dana pensiun dari keseluruhan pekerja di Indonesia hanya sebesar 21 persen dari sekitar 118 juta pekerja di Indonesia. Oleh karena diperlukan adanya sosialisasi yang masif dari pemerintah untuk meningkatkan jumlah peserta dana pensiun.

3. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur jalan nasional artinya variabel PDRB memiliki kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur. Hal ini dikarenakan kenaikan PDRB berhubungan dengan peningkatan produksi barang dan jasa. Apabila terjadi peningkatan produksi barang dan jasa pada sektor PDRB maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan pajak bagi negara, yang mana pajak ini nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Salah satunya adalah untuk pembangunan infrastruktur yang di dalam APBN ataupun APBD disebut sebagai belanja modal. Sehingga apabila PDRB meningkat maka pendapatan pajak juga akan meningkat dan peningkatan pajak tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan negara atau pendapatan daerah, sehingga peningkatan untuk pembiayaan infrastruktur dalam APBN maupun APBD dapat ditingkatkan.

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa terdapat dua variabel yaitu variabel investasi dan variabel PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan

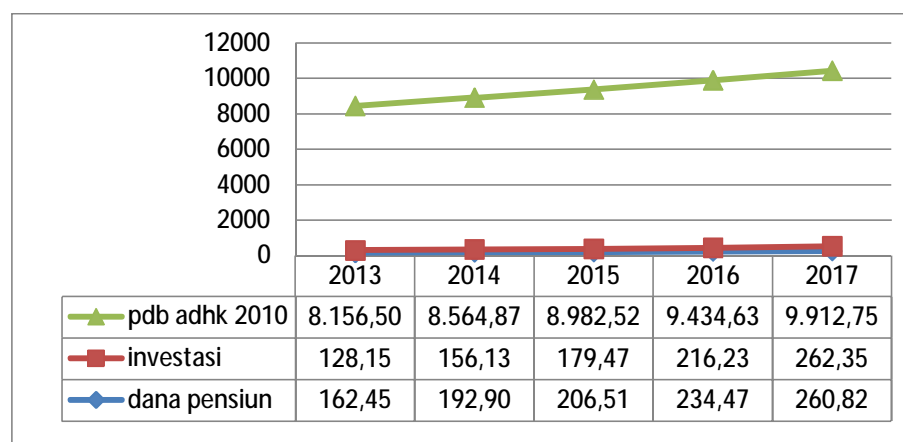
terhadap pembangunan infrastruktur jalan nasional. Hal ini sejalan dengan teori-teori pembangunan ekonomi baik itu klasik maupun neo klasik yang menyatakan bahwa modal merupakan komponen yang penting bagi pembangunan ekonomi. Menurut Adam Smith (Jhingan, 2010:83) menyatakan bahwa “pemupukan modal menjadi salah satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi oleh sebab itu manusia harus lebih banyak menabung dan menanam modal”. Menurut David Ricardo (Jhingan, 2010:90) menyatakan bahwa “ pemupukan modal dapat dilakukan melalui tabungan, tabungan dapat dapat dibentuk dengan cara menghemat pengeluaran, dan memproduksi lebih banyak barang. Semakin banyak tabungan semakin banyak pemupukan modal”. Dalam teori pembangunan ekonomi Malthus (Jhingan, 2010:98) juga menyatakan bahwa “akumulasi modal merupakan faktor paling penting bagi pembangunan ekonomi. Peningkatan kesejahteraan yang mantap dan berkesinambungan tidak mungkin tercapai tanpa penambahan modal secara terus menerus.

Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa modal merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, baik itu modal yang berasal dari tabungan nasional maupun dari pajak. Karena setiap pembangunan baik itu ekonomi maupun sosial ekonomi memerlukan biaya yang besar terkhusus pada bidang infrastruktur, hal itu dapat dilihat di RPJMN bahwa pemerintah membutuhkan modal sebesar 4700 triliun untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mana Indonesia saat ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain seperti Malaysia, Thailand, Singapore, dan lain-lain.

Melihat fenomena saat ini dimana hutang pemerintah yang setiap tahunnya terus meningkat, yang sebagian besar digunakan untuk pembiayaan infrastruktur baik itu jalan, jembatan, waduk, listrik dan sebagainya yang mana menurut data Bank Indonesia pada tahun 2017 sudah mencapai Rp. 4.648 triliun. Oleh sebab itu pemerintah perlu mengatisipasi kondisi hutang tersebut, salah satu wacana yang ingin dilakukan pemerintah adalah dengan lebih memanfaatkan dana-dana didalam negeri yang dalam kondisi diam seperti penggunaan dana haji maupun dana pensiun untuk membantu dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Akan tetapi sampai saat ini wacana tersebut belum terealisasi hal ini dikarenakan masih adanya pro dan kontra baik itu secara politis maupun kajian-kajian ilmiah tentang penggunaan dana-dana tersebut untuk infrastruktur.

Jika dilihat besaran dana haji selama lima tahun terakhir ini potensi untuk digunakan sebagai pembiayaan infastruktur sangat besar. Berikut adalah data perbandingan Dana Pensiun, Investasi dan PDB Indonesia.

Gambar 4.10
Perbandingan PDB,DP,INV (Triliun rupiah)



Sumber: BPS dan OJK diolah

Dari perbandingan ketiga variabel diatas dapat dilihat bahwa dana pensiun memiliki potensi yang besar jika dibandingkan dengan variabel investasi PMDN,

jumlah dana pensiun masih lebih besar walaupun selisihnya tipis. Artinya dana pensiun akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi jika digunakan dengan tepat, terkhusus untuk pembangunan infrastruktur.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil regresi/estimasi dari model yaitu pengaruh pengaruh INV, DP dan PDRB terhadap INF sebesar 98.31 % sedangkan sisanya 1.69 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model estimasi, atau berada dalam *distrurbance error term*.
2. Secara simultan variabel INV, DP, dan PDRB mempengaruhi INF.
3. Secara parsial, variabel INV berpengaruh positif dan signifikan terhadap INF , variabel DP berpengaruh negative dan signifikan terhadap INF, dan variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap INF.

5.2 Saran

1. Dana pensiun yang terhimpun merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk membantu percepatan pembangunan ekonomi negara secara berkesinambungan untuk menuju kondisi ekonomi dan sosial yang lebih baik. Dana pensiun yang terhimpun dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian bahwa dana pensiun yang terhimpun berpotensi digunakan untuk membantu pembangunan ekonomi berupa infrastruktur, dan dana tersebut dapat digunakan untuk investasi yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefianto, Moch. Doddy. 2012. *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan menggunakan E-Views*. Jakarta:Erlangga.
- Badan Pusat Statistik. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. www.bps.go.id. Diakses 30 November 2018.
- Badan Pusat Statistik. *Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga ADHB dan Persentasenya terhadap PDB*. www.bps.go.id. Diakses 1 Desember 2018.
- Badan Pusat Statistik. *PDB Per kapita*. www.bps.go.id. Diakses 27 Februari 2019.
- Badan Pusat Statistik. *Persentase Penduduk Miskin Indonesia*. www.bps.go.id. Diakses 27 Februari 2019.
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. www.bps.go.id. Diakses 27 Februari 2019.
- Badan Pusat Statistik. *Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi*. www.bps.go.id. Diakses 27 Februari 2019.
- Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha*. www.bps.go.id. Diakses 27 Februari 2019.
- Fahmi, Irham. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Bandung:Alfabeta.
- Fajar, Syeh Ibnu. 2013. *Pengaruh Ekspor-Impor dan Indeks Harga Konsumen terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Skripsi Ilmu Ekonomi dan Stu di Pembangunan. UIN Syarif Hidayatulla, Jakarta.
- Febriani. *Pengaruh Tabungan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat*. Jurnal Manajemen. Universitas Taman Siswa, Padang.
- Gujarati Damodar & Dawn Porter. 2013. *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2*. Jakarta:Salemba Empat.

- Hady, H. 2001. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Indonesian Monetary Fund. *Persentase Gross National Saving dan Investasi terhadap PDB*. www.imf.org. Diakses 1 Desember 2018.
- Jhingan, M.L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, edisi ke enam belas*. Jakarta:PT Raja Grafindo Pustaka.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Belanja Modal dan Belanja Rutin PNS*. www.kemenkeu.go.id. Diakses 1 Desember 2018.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Anggaran Infrastruktur Indonesia*. www.kemenkeu.go.id. Diakses 27 Februari 2019.
- Kementerian Pekerjaan Umum. *Total Panjang Jalan Nasional*. www.pu.go.id. Diakses 27 Februari 2019.
- Mankiw, N.Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta:Erlangga
- Nachrowi, Djalal dan Hardius Usman. 2002. *Penggunaan Teknik Ekonometrika*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Ananda, Rizky. *Implementasi Kebijakan Transfer Daerah Dalam Meningkatkan Pembangunan Nasional (Case Study : Kepemimpinan SBY dan JKW)*. Skripsi Ekonomi dan Bisnis. UMSU, Sumatera Utara.
- Saputri, Shinta. *Pengaruh Konsumsi, Investasi, Tabungan, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Pasar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Padang*. Jurnal Pendidikan Ekonomi. STKIP PGRI, Sumatera Barat.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Pustaka.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makroekonomi Modern*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Pustaka

Sumastuti, Efriyani. 2008. *Model Tabungan Rumah Tangga (Sintesis Life Cycle-Permanent Income Hypothesis = LC-PIH) : Studi Kasus Kota Semarang*. Disertasi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Universitas Diponegoro. Semarang.

Swaramarinda dan Indriani. 2011. *Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Ekonomi. Volume IX Nomor 2.

Todaro, Michael P dan Stephen C.Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, edisi kedelapan*. Jakarta:Erlangga

Todaro, Michael P dan Stephen C Smith. 2011. *Pembangunan Ekonoomi Jilid 1*. Jakarta:Erlangga.

Winanda, Ayu Ade. 2016. *Analisis Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bandar Lampung*. Skripsi Ekonomi Pembangunan. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Yuniasih, Fitri Aisyah. 2011. *Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN Tahun 1980-2009*.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/03/piramida-penduduk-indonesia-masuk-tipe-ekspansive>.

<https://economy.okezone.com/read/2018/02/06/320/1855567/dana-pensiun-akan-digunakan-untuk-biayai-pembangunan-infrastruktur>.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2010/02/10/13085158/bps.pertumbuhan.ekonomi.2009.capai.4,5.persen>.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2011/08/16/15251031/sby.pertumbuhan.ekonomi.2011.tertinggi>.